

**IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGI  
DISKOPERINDAG DALAM PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KECIL TANGGULANGIN PASCA  
BENCANA LUMPUR LAPINDO**

**(Studi Pada Diskoperindag Sidoarjo dan Pengrajin Industri kulit  
Tanggulgingin)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**JIMMY DWI FITRIANTO**

**0810313107**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2012**

## MOTTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati satu kegagalan ke kegagalan lainnya tanpa kehilangan semangat.

By Sir Winston Churchill (Politikus Inggris)

Sabar adalah kunci kesuksesan, seperti halnya mengerjakan skripsi ini penuh dengan kesabaran untuk mencapai sebuah kesuksesan.

By Jimmy Dwi Fitrianto (Scooter Holic)



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : “Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag Dalam  
Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangin Pasca  
Bencana Lumpur Lapindo (studi pada Diskoperindag  
Kabupaten Sidoarjo dan Pengrajin Industri Kulit  
Tanggulangin)”

Disusun oleh : JIMMY DWI FITRIANTO

NIM : 0810313107

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi :



Malang, 29 Oktober 2012

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Agus Suryono, MS

Drs. Siswidivanto, MS

NIP. 19521229 197903 1 003

NIP. 19600717 198601 1 002

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 November 2012  
Jam : 09.00 WIB  
Skripsi atas nama : Jimmy Dwi Fitrianto  
Judul : Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag  
Dalam Pemberdayaan Industri Kecil  
Tanggulangi Pasca Bencana Lumpur Lapindo

**dan Dinyatakan Lulus**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

**Prof. Dr. Agus Suryono, MS**  
**NIP. 19521229 197903 1 003**

**Drs. Siswidiyanto, MS**  
**NIP. 19600717 198601 1 002**

Anggota

Anggota

**Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS**  
**NIP. 19691002 199802 1 001**

**Farida Nurani, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19700721 200501 2 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 6 November 2012



Nama: JIMMY DWI FITRIANTO

NIM: 0810313107

## RINGKASAN

Jimmy Dwi Fitrianto, **Implementasi Rencana Strategis Diskoperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangin Pasca Bencana Lumpur Lapindo (studi pada Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo dan Pengrajin Industri Kulit Tanggulangin)**, Prof. Dr. Agus Suryono, MS., Drs. Siswidiyanto, MS. 114 Hal+x.

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui implementasi renstra Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo. Hal ini dikarenakan penurunan omset pada industri kecil Tanggulangin akibat dampak isu lumpur lapindo. Selain itu, produk industri kecil kulit merupakan produk unggulan dari Kabupaten Sidoarjo yang harus tetap dipertahankan. Sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan diperlukan sebuah keseriusan dalam pembinaan guna mensejahterahkan kembali pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian dalam penelitian Akuntabilitas Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil tas dan koper Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo meliputi (1) Peran Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil pasca bencana lumpur lapindo, perkembangan tingkat pendapatan pengusaha melalui kegiatan pemberdayaan industri kecil tas dan koper dilihat dari segi produksi, tingkat kepuasan konsumen dari pemakaian produk dilihat dari segi kualitasnya dan (2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi rencana strategis diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulangin khususnya pada industri tas dan koper.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Strategi berdasarkan Program Pemberdayaan Industri Kecil berjalan dengan baik dengan hasil yang dikatakan baik pula, walau ada sisi kekurangan dari frekuensi pelatihan yang dilakukan. Segala bentuk perhatian pemerintah melalui kegiatan pemberdayaan nampaknya membuahkan hasil positif di mata para pengusaha. Di mana kegiatan tersebut dapat kembali memulihkan perkonomiannya yang sempat terpuruk akibat dampak isu bencana lumpur lapindo. Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang bersumber dari kurangnya frekuensi pelatihan, namun hal tersebut masih mampu diatasi melalui pendekatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo.

Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa Diskoperindag harus memperhatikan apa yang menjadi hambatan dalam proses implementasi strategi pemberdayaan, agar dapat memperlancar proses pembinaan terhadap pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin, meskipun implementasi strategi pemberdayaan dikatakan berhasil karena dapat mensejahterahkan kembali pengusaha industri kecil pasca bencana lumpur lapindo.

Kata kunci : Implementasi Renstra, Pemberdayaan

## SUMMARY

Jimmy Dwi Fitrianto, **Strategic Plan Implementation of Diskoperindag In Empowering Small Industries at Tanggulangin Post of Lapindo Mud Disaster (study at Diskoperindag Sidoarjo and Tanggulangin Leather Craftsmen Industries)**, Prof..DR Agus Suryono, MS., Drs. Siswidiyanto, MS. It 114 + x.

The research was conducted to determine the strategic plan implementation by Diskoperindag Sidoarjo in empowering small scale industries at Tanggulangin post Lapindo mud disaster. This is due to lower turnover in small industry Tanggulangin aftermath Lapindo mud issues. In addition, small leather products industry is the flagship product of Sidoarjo regency should be retained. Thus, in the empowerment needed a seriousness in guidance small industrial entrepreneurs to prosper back Tanggulangin bags and suitcases.

The research method used in this research is qualitative with descriptive approach. The research focus in the research Strategic Plan Implementation Accountability of Diskoperindag in empowering small bags and suitcases industry Tanggulangin post Lapindo mud disaster is (1) Diskoperindag Role In Empowering Small Industries Post Lapindo Mud Disaster, entrepreneur income level Development trough the empowerment of small industrial bags and luggage views of terms of production, consumer satisfaction levels in terms of product quality, and (2) the supporting and inhibiting factors from the strategic plan implementation by diskoperindag in empowerment of Tanggulangin small scale industries especially in industrial bags and suitcases.

The results of this research indicate that the implementation Strategic Plan by Small Industrial Empowerment Program goes well with any good results, anyway despite the shortcomings of training frequency. All forms of government attention through empowerment seems to produce positive results in the employers sights. Where such activities can be re-restore the economical problem that had collapsed due to the impact of Lapindo mud disaster issues. The appear problems is just rudimentary derived from the lack of training frequency, but it is still able to be addressed through a sustainable approach by Diskoperindag Sidoarjo.

From the results of this research suggested that Diskoperindag should pay attention to what makes bottlenecks in the process of implementing empowerment strategies, in order to expedite the process of development of the small industrial entrepreneurs Tanggulangin bags and luggage, despite the implementation of an empowerment strategy is successful because it can prosper again the small industrial entrepreneurs after Lapindo mud disaster.

Keywords: Strategic Plan Implementation, Empowering

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangin Pasca Bencana Lumpur Lapindo” sesuai target peneliti sendiri. Skripsi ini dilandasi semangat bahwa peneliti percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Skripsi ini juga dilandasi kepercayaan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan implementasi strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo memiliki sistem pembinaan terhadap pengusaha industri tas dan koper untuk menghidupkan kembali usahanya pasca bencana lumpur lapindo. Semangat itu pada akhirnya terdokumentasikan dalam skripsi yang berbicara masalah implementasi strategi dengan prinsip pemberdayaan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Selain itu, skripsi ini merupakan wadah aktualisasi peneliti dalam mengamalkan segala ilmu yang didapatkan dari studinya selama ini di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, yaitu orang tua, sanak famili, dan sahabat-sahabat. Disamping itu, tidak terlepas juga bantuan dan



dukungan dari jajaran dekanat dan individu-individu dari instansi dimana peneliti melakukan risetnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prambudi dan Fadilah, S. Pd., yang merupakan ayah dan ibu peneliti yang telah memberikan segala dukungan baik moril maupun materiil.
2. Prof. Dr. Sumartono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. M.R. Khairul Muluk, S. Sos, M. Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Prof. Dr. Agus Suryono, MS., selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Drs. Siswidiyanto, MS., selaku Anggota Komisi Pembimbing.
6. Moh. Said, S. Sos, MAP., selaku pemberi persetujuan judul yang dipilih peneliti.
7. Bapak Maksum, MSi., selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo.
8. Bapak Drs. Setyo Winarno, MSi., selaku Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo.
9. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang selalu ada dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 29 Oktober 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

### MOTTO

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### TANDA PENGESAHAN

### PERYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI

### RINGKASAN

### SUMMARY

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah	
1. Pengertian Pemerintah Daerah	11
2. Pengertian Otonomi Daerah	11
3. Pengertian Desentralisasi	12
4. Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah	13
5. Manfaat Desentralisasi Bagi Daerah	14
B. Kebijakan Publik dan Implementasi Rencana Strategis	
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
a. Kebijakan	15
b. Kebijakan Publik	17
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	19
3. Pengertian Strategi	20
4. Pengertian Perencanaan Strategis	22
a. Cara Merumuskan Renstra	25
b. Komponen-Komponen Umum Renstra	27
c. Manfaat Perencanaan Strategis	30
d. Rencana Strategis Diskoperindag Sidoarjo	31
C. Pemberdayaan	
1. Pengertian Pemberdayaan	32
2. Tahapan Pemberdayaan	32

3. Strategi Pemberdayaan .....	35
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan .....	38
5. Permasalahan Dalam Pemberdayaan .....	39
D. Industri Kecil .....	42
1. Pengertian Industri Kecil .....	42
2. Peranan Industri Kecil Dalam Pembangunan .....	44
3. Permasalahan Industri Kecil .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Fokus penelitian .....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	54
D. Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Instrumen Penelitian .....	57
G. Analisis Data .....	58

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo dan Sentra Industri Kecil Tas dan Koper Tanggulangin	
a. Topografi .....	61
b. Pemerintah Daerah .....	62
c. Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin .....	62
2. Gambaran Umum Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo	65
a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	65
b. Struktur Organisasi .....	68
c. Visi, Misi, dan Tujuan .....	79
d. Sasaran .....	82
B. Penyajian Data	84
1. Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin dalam mengatasi bencana lumpur lapindo	
a. Peran Diskoperindag dalam mengatasi bencana lumpur lapindo	
1) Pembinaan Desain Produk .....	86
2) Pembinaan Dalam Bidang Promosi .....	87
b. Perkembangan tingkat pendapatan pengusaha kegiatan pemberdayaan industri kecil tas dan koper dilihat dari segi produksi .....	88
c. Tingkat kepuasan konsumen dari pemakaian produk dilihat dari segi kualitasnya .....	92
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi rencana strategis diskoperindag dalam	94

pemberdayaan industri kecil tanggulangi khususnya pada industri tas dan koper

a. Faktor Internal .....	96
b. Faktor Eksternal .....	97
<b>C. Pembahasan</b>	
3. Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangi dalam mengatasi bencana lumpur lapindo	
a. Peran Diskoperindag dalam mengatasi bencana lumpur lapindo	
1) Pembinaan Desain Produk .....	100
2) Pembinaan Dalam Bidang Promosi .....	102
b. Perkembangan tingkat pendapatan pengusaha melalui kegiatan pemberdayaan industri kecil tas dan koper dilihat dari segi produksi .....	104
c. Tingkat kepuasan konsumen dari pemakaian produk dilihat dari segi kualitasnya .....	106
4. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi rencana strategis diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil tanggulangi khususnya pada industri tas dan koper	
a. Faktor Internal .....	108
b. Faktor Eksternal .....	111

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	116

## **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

No	Judul	Hal.
1	Kondisi Industri Kulit Tanggulangin	67
2	Pola Pembiayaan Kerajinan Kulit Kabupaten Sidoarjo 2012	68
3	Rencana Kerja Tahun 2012	86



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat	34
2	Komponen-komponen Analisa Data Model Interaktif	59
3	Peta Lokasi Kecamatan Tanggulangin	65
4	Struktur Organisasi Diskoperindag	81
5	Pembinaan Desain Produk	88
6	Kegiatan Pameran	89
7	Proses pemasaran produk dari produsen (pengrajin) sampai ke tangan konsumen	91
8	Proses konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan	91

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Pedoman Wawancara	xv
2	Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo	xvii
3	Curriculum Vitae	xviii



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk menuju kemakmuran yang mutlak dilakukan oleh negara. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi pada wilayahnya.

Menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004, h.21) menyimpulkan bahwa definisi pembangunan merupakan citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas). Pembangunan, menurut literatur-literatur ekonomi pembangunan, sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumberdaya. Bila dilihat dari beberapa pengertian yang diberikan terhadap pembangunan terlihat bagaimana pembangunan selalu di indentifikan dengan sebuah pertumbuhan fisik serta proses pengolahan sumberdaya, dengan arti lain salah satu yang tampak dari pembangunan adalah terbentuknya industri-industri.



Dalam pembangunan, industri memegang peranan penting dalam perekonomian karena pertumbuhan industri memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum peran industri dalam pembangunan adalah :

- a) Sebagai sarana penambahan kesempatan kerja
- b) Sebagai penggerak roda ekonomi
- c) Mampu menggerakkan tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi lain baik itu ke depan atau ke belakang sehingga tidak terlalu tergantung dengan negara lain.
- d) Meningkatkan pendapatan baik perorangan maupun nasional
- e) Mengelola bahan mentah yang banyak terdapat di Indonesia
- f) Supaya Indonesia dapat mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara ini.

Mengingat perkembangan industri kecil sangatlah penting bagi masyarakat kecil menengah. Hal ini diharap nantinya mengarah pada ekonomi mikro yang mana dapat meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, Perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional dimana hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, industri selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan industri.

Peranan industri tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Beberapa kendala atau tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil menurut Tambunan (2002, h.70-81) adalah sebagai berikut:

1) Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala bagi usaha kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar atau industri besar dan impor, maupun di pasar ekspor. Hal ini disebabkan karena terbatasnya informasi, kekurangan modal dan SDM yang relatif rendah. Kesulitan pemasaran ini meliputi permintaan menurun, tidak mampu menjual pada harga pasar, tidak mampu bersaing dalam kualitas dan pelayanan.

2) Kesulitan pengadaan bahan baku

Keterbatasan bahan baku juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM khususnya industri kecil di Indonesia. Kesulitan pengadaan bahan baku meliputi harga naik terlalu tinggi dan persediaan bahan baku.

3) Kekurangan modal

Industri kecil di Indonesia sering bahkan selalu dihadapi dua masalah utama dalam aspek finansial yaitu mobilitas modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi (perluasan kapasitas produksi atau menggantikan mesin-mesin tua). Industri kecil umumnya kurang berminat untuk meminta kredit dari perbankan dan bantuan dari BUMN. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya adalah: lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak bagi pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratannya terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele dan kurang informasi mengenai skim-skim Bank yang dijadikan sumber-sumber dominan bagi industri kecil. Selain Bank sebagai asal pinjaman utama, terdapat pula koperasi, lembaga keuangan non bank, keluarga, perorangan dan lain-lain.

4) Kesulitan membayar pekerja, dikarenakan pendapatan atau perolehan menurun dan UMR naik.

Kendala inilah yang memerlukan perhatian penuh dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar industri di Indonesia dapat berkembang dengan baik.

Dewasa ini industri berkembang dengan pesatnya. Secara umum industri merupakan kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga berbentuk jasa. Usaha kecil merupakan salah satu pilar perekonomian nasional, akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional karena perkembangannya sangat cepat. Salah satu sentra industri yang paling berkembang di Sidoarjo adalah sentra industri kulit yang banyak menawarkan aneka produk berkualitas, antara lain adalah tas dan koper. Sidoarjo merupakan kota industri yang tak pernah mati, ungkapan yang cocok untuk Sidoarjo dulu.

Eksistensi Sentra Kerajinan Kulit Tanggulangin dalam beberapa tahun belakangan ini terancam mati sejak Lumpur Panas Porong menyembur di Porong, Sidoarjo. Beberapa kecamatan yang bersebelahan dengan lokasi semburan lumpur ikut terkena getahnya. Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau Lumpur Panas Porong atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT LAPINDO Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006, bersamaan dengan gempa berkekuatan 5,9 SR yang melanda Yogyakarta. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan

permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur (Wikipedia).

Luapan lumpur panas Lapindo memang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan industri tas dan koper Tanggulangin. Apalagi dalam setiap pemberitaan media massa, luapan lumpur sudah mencapai Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera yang memunculkan persepsi perumahan tersebut berada dalam satu kawasan dengan industri tas tanggulangin. Padahal secara geografis, tanggulangin masih 4 sampai 5 kilometer dari pusat semburan lumpur Lapindo. Sampai hari ini, sentra industri tas dan koper terbesar di Jawa Timur itu pun sama sekali belum tersentuh pekatnya lumpur.

Dari fenomena tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Hampir 70 persen perajin di Tanggulangin sudah gulung tikar. Beberapa di antara mereka yang masih bertahan hanya untuk menggarap pesanan. Sepinya pengunjung tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi lebih jauh pada langkah pengurangan pegawai karena pengusaha tas dan koper tidak bisa lagi menutup biaya operasional.

Dapat diketahui bahwa jumlah produksi industri kecil/kerajinan rakyat di kecamatan Tanggulangin mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2006 dan 2007. Padahal nilai produk industri tas kulit di Tanggulangin juga telah memberikan sumbangan terbesar untuk total nilai produksi kerajinan rakyat. Jika di tahun 2003 hingga tahun 2005 nilai hasil produksi naik sedikit demi sedikit namun, di tahun 2006 dan 2011 produksi menurun drastis.

Disamping itu, pemberitaan media massa yang menyebut luapan lumpur telah menenggelamkan Perumahan TAS (Tanggulangi Anggun Sejahtera) membuat sejumlah masyarakat berpikir bahwa TAS yang dimaksud adalah 'tas' Tanggulangi atau Kawasan Industri Tas Tanggulangi. Padahal, jarak luapan lumpur dengan lokasi Kawasan Kerajinan Kulit Tanggulangi masih cukup jauh.

Dampak dari luapan lumpur panas Lapindo, krisis ekonomi yang muncul sebagai dampak dari krisis moneter dan pada gilirannya telah menimbulkan multi krisis yang berskala luas telah menjadi persoalan yang sulit di atasi. Pemulihannya melalui upaya yang komprehensif dan efektif merupakan prasyarat bagi pemulihan keseluruhan krisis yang mengikutinya. Sebagaimana menjadi acuan bagi segenap upaya pemulihan. Diskoperindang dalam rencana strategi pengembangan industri kecil Sidoarjo 2009, menetapkan tujuan dan sasaran memberdayakan usaha kecil khususnya pada industri tas dan koper Tanggulangi yang selama ini mengalami penurunan omzet, antara lain :

1. Tujuan
  - a. Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup pengusaha.
  - b. Terpenuhinya barang dan jasa di pasaran dalam jumlah dan harga yang terjangkau.
  - c. Terlindunginya konsumen dari pemakaian produk.
2. Sasaran
  - a. Meningkatnya kemampuan pengusaha industri dan perdagangan dalam mengelola usahanya.
  - b. Meningkatnya peluang usaha bagi pengusaha untuk mendapatkan peluang yang lebih besar.
  - c. Meningkatkan pemasaran produk.
  - d. Lancarnya pengadaan dan penyaluran barang dagangan.
  - e. Meningkatnya perlindungan konsumen.

Untuk mencapai tujuan / sasaran maka ditetapkanlah kebijakan dan program rencana strategis, yaitu :

1. Kebijakan internal

- a. Memfasilitasi pengusaha untuk mendapat peluang yang lebih besar.
- b. Peningkatan kepuasan pelayanan dan perluasan pasar melalui media informasi dan promosi
- c. Pendayagunaan potensi daerah yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan.

2. Kebijakan eksternal

- a. Dukungan permodalan berupa pinjaman uang dengan bunga lunak dari bank pemerintah maupun swasta.
- b. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait yang saling mendukung dalam pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan.
- c. Peningkatan jumlah bantuan industri kecil dan menengah dan dana bergulir secara kontinyu.
- d. Iklim dan geografi kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang ditangani oleh industri dan perdagangan.

Dari beberapa program tersebut hanya dua program yang di implementasikan kepada industri kecil tas dan koper Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo, yaitu pembinaan desain produk dan pembinaan dalam bidang promosi.

Berdasarkan pemikiran di atas, bahwa betapa pentingnya keberadaan industri dalam perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Sidoarjo yang mana peranan pemerintah sangatlah penting bagi para pengusaha industri tas keluar dari krisis ekonomi tersebut. Maka dengan paparan diatas peneliti tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Implementasi**

**Rencana Strategi Diskoperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangin Pasca Bencana Lumpur Lapindo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi rencana strategi Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi rencana strategi pemberdayaan industri kecil Tanggulangin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi renstra Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi renstra pemberdayaan industri kecil Tanggulangin khususnya industri tas dan koper.

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik bagi pemerintah maupun bagi kalangan akademi. Kontribusi bagi penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi peneliti sendiri, untuk menambah wawasan dan pemahaman apa yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dan Pengrajin Industri Tas dan koper tanggulangin) dalam rangka memberdayakan industri kecil Tanggulangin.

2) Bagi Pengrajin, khususnya Pengrajin industri tas Tanggulangin berguna sebagai solusi dalam memulihkan kembali produksinya.

3) Bagi akademisi digunakan sebagai evaluasi sampai sejauh mana kesesuaian antara progam mata kuliah dengan dunia kerja yang dihadapi serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahai isi skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan.

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

#### **Bab II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pernyataan peneliti yang meliputi konsep dan pengertian dari judul dan permasalahan yang diangkat.



### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data.

### **Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisikan penyajian data, data fokus penelitian dan analisis data sehubungan dengan Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangan Pasca Bencana Lumpur Lapindo. Suatu keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangan dan yang menjadi kendala dalam mengatasinya.

### **Bab V : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran hasil penelitian diuraikan secara garis besar merupakan temuan pokok, baik yang bersifat substansial maupun metode teknis dari hasil pembahasan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintahan Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Syaukani (2003:232-234) pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah lainnya. Itulah yang disebut pemerintahan.

Dalam hal ini *local government* dapat dimaknai: Pertama, sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang didesentralisasikan. Kedua, sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi. Dan ketiga, sebagai daerah otonom tempat dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri. (Muluk, 2009:67).

Setelah mengetahui ulasan tersebut, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berada pada tingkat lokal.

##### 2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi merupakan sarana kebijaksanaan yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan “Negara Bangsa” karena dengan otonomi

akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan di antara segenap warga bangsa ini (Syaukani, 2003:210).

Otonomi Daerah merupakan kewajiban Daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakekatnya Otonomi Daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (Syaukani, 2003:144).

### 3. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah keniscayaan bagi penyelenggaraan lokal pemerintah demokratis yang mana kebijakan desentralisasi itu melahirkan pemerintahan daerah untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice*. Desentralisasi dimaksudkan sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tergolong majemuk dengan kondisi dan potensi yang beragam pula (Muluk, 2009:iii).

Jika menurut Muluk (2009:13) desentralisasi dalam arti luas itu mencakup desentralisasi (devolusi), dekonsentrasi, delegasi, privatisasi, dan deregulasi. Adapula yang mengatakan bahwa desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan (*trust*) dari pemerintah pusat kepada daerah (Syaukani, 2003:172). Sehingga Desentralisasi dimaknai sebagai sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal.

#### 4. Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Disinilah didasari bahwa desentralisasi bukanlah suatu hal yang menghambat untuk menghadapi globalisasi. Desentralisasi justru telah menciptakan peluang untuk memperkuat basis lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, Kanter (1995) dalam Muluk (2008:169) juga telah mengungkapkan bahwa:

“Globalisasi tidak dengan sendirinya meniadakan potensi lokal, bahkan lokal justru memiliki peluang yang sangat besar untuk menanggung manfaat dari perekonomian global. Tampaknya ia ingin mengatakan bahwa daerah tidak dengan serta merta tergilas oleh globalisasi jika masyarakat menyadari ungkapan *“think globally and act locally”*”.

Adapun dampak dari pelaksanaan Otonomi Daerah melalui pembangunan partisipatif bahwa evaluasi umum atas Otonomi Daerah adalah adanya penyimpangan dan penyempitan makna. Pertama, dikatakan bahwa otonomi daerah masih mengalami penyempitan makna yaitu, ketika otoda hanya dipandang dari sisi keuangan saja, Otonomi Daerah dianggap sebagai ajang penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Sehingga seringkali justru dengan Otonomi Daerah masyarakat malah makin terjepit dalam kondisi biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*). Kedua, Otonomi Daerah justru ditanggapi oleh daerah-daerah sebagai penyekatan secara tegas wilayah-wilayah antar daerah secara horizontal dan penyekatan hierarki organisasi secara vertikal. (Putra, 2005:86)

## 5. Manfaat Desentralisasi Bagi Daerah

Menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli (1983, pp.14-16) dalam Syaukani (2002:32) menyampaikan paling tidak ada empat belas (14) alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi, yaitu:

- a. Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. dengan desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.
- b. Desentralisasi dapat mendorong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di Daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik dari pemerintah.
- d. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak difahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.
- e. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.
- f. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah serta lembaga privat di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dijalankan oleh Departemen yang ada di pusat. Dengan desentralisasi maka peluang bagi masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial.
- g. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah. Dengan demikian, pejabat di pusat dapat menggunakan waktu dan energi mereka untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap implementasi kebijaksanaan.
- h. Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan

pejabat daerah dan sejumlah NGOs di berbagai daerah. Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah.

- i. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Struktur seperti itu dapat merupakan wahana bagi pertukaran informasi yang menyangkut kebutuhan masing-masing daerah kemudian secara bersama-sama menyampaikan kepada Pemerintah.
- j. Dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktifitas yang dilakukan oleh elit lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.
- k. Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah Daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara.
- l. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor, dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat.
- m. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.
- n. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban Pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada daerah.

## **B. Kebijakan Publik Dan Implementasi Rencana Strategis**

### **1. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik**

#### **a. Kebijakan**

Menurut Thoha (1988:56) bahwa dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:

- a. *Policy* merupakan praktika sosial, bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan “*claim*” dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan “*incentive*” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan suatu *policy*.

Maka dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Adapun istilah *policy* ini didefinisikan oleh Harold Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Thoha (1988:58) menyatakan bahwa:

“*policy* dapat dirumuskan sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika”.

Sedangkan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Thoha (1988:58), mengemukakan bahwa:

“*policy* dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya”.

Serta adapula pengertian kebijakan, bahwa kebijakan sebagai *field of study* lebih menekankan pada apa yang benar-benar dikerjakan daripada apa yang

diusulkan atau dikehendaki, dengan mengedepankan kedudukan aktor didalamnya. Aktor dalam makna ini bisa berupa orang atau badan hukum yang bekerja untuk mencapai tujuan dengan tindakan tertentu (Danim, 2005:11).

Disamping itu, Carl Friedrich dalam Wahab (2005:3), yang menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Anderson dalam Wahab (2005:3) kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

#### **b. Kebijakan Publik**

Dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi publik adalah Kebijakan Publik. Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi publik. Karena selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Dengan demikian W.I Jenkins dalam Wahab (2005:4) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.



Sedangkan menurut Chief J.O Udoji dalam Wahab (2005:5), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Istilah *public policy* ini menurut Thoha (1988:51) adalah proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijaksanaan.

Selain itu istilah kebijakan publik adalah:

“Kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah ilmu alat. Artinya, ia dikembangkan berbasis pada kebutuhan untuk memecahkan permasalahan praktis di lapangan. Beberapa kalangan lebih senang mendudukkannya sebagai sebuah kajian akademis ilmiah. Hal itu dilarang. Akan tetapi, itu hanya sebagai sarana saja agar kebijakan publik menjadi lebih tajam dalam menyelesaikan masalah-masalah riil yang ada (Putra 2005:20)”.

Adapun *public policy* menurut David Easton dalam Thoha (1988:60), yaitu:

“Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut”.

Serta pendapat terakhir yang dikemukakan oleh Dunn (2003:65) bahwa *public policy* adalah rangkaian panjang pilihan-pilihan yang kurang lebih berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak berbuat, yang dibuat oleh kantor-kantor atau badan-badan pemerintah.

## 2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sehingga Udoji dalam Wahab (2005:59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Jika mengacu pada Wahab (2005:64) implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Lebih lengkapnya menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Istilah *policy implementation* adalah pelaksanaan dan pengarahan tindakan kebijaksanaan dalam jangka waktu tertentu (Dunn, 2003:64).

Menurut Parsons (2006:463) mengemukakan bahwa:

“Studi implemementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan

berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Jenskin, 1978:203).”

Jadi implementasi menurut Anderson dalam Parsons (2006:464) diartikan bahwa implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain. Lalu, masih tetap dengan pendapat yang sama bahwa implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentu tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

### 3. Pengertian Strategi

Menurut Suryono (2004, h.70-80), strategi dimaksudkan sebagai seni dan ilmu untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana untuk kepentingan tertentu, dan masalah-masalah yang dikaji di dalamnya adalah : (a) kebijaksanaan pelaksanaan, (b) penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan (c) penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut.

*Hax* dan *Majluf* sebagaimana yang dikutip oleh Salusu (1996, h.100), mencoba menawarkan rumusan yang komperehensif tentang strategi sebagai berikut:

1. ialah suatu keputusan yang konsisten, yang menyatu, dan integral;
2. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
3. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
4. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
5. melibatkan semua tingkat hirarki dari organisasi.

Dengan definisi tersebut, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

*McNichols* sebagaimana yang dikutip oleh Salusu (1996, h.101) mencoba mendefinisikan strategi dengan lebih sederhana. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalulhi hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi itu sangat penting untuk dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat, bukan hanya oleh pejabat tinggi.

Para eksekutif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun dapat berhasil dengan menyakinkan. Bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan. *Hatten dan Hatten* sebagaimana yang dikutip oleh Salusu (1996, h.108), memberikan prinsip-prinsip agar suatu strategi dapat dilaksanakan dengan sukses, yaitu :

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraikan beraikan satu dengan yang lain.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya.
5. Sumber daya adalah suatu yang kritis.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar.

7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
8. Tanda-tanda dari kesuksesan strategi tampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dari organisasi.

#### 4. Pengertian Perencanaan Strategis

Pengertian perencanaan strategis, dalam Modul 2 sosialisasi AKIP yang diterbitkan oleh LAN-BPKP, sebagaimana yang dikutip oleh Riyadi-Bratakusumah (2004, h,279), dinyatakan bahwa :

“Perencanaan strategi merupakan suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.”

Dapat dijelaskan bahwa adanya beberapa point penting yang berkaitan dengan renstra, yaitu : (1) merupakan proses sistematis dan berkelanjutan; (2) merupakan pembuatan keputusan yang beresiko; (3) didasarkan pada pengetahuan antisipatif dan aktivitas yang diorganisir; (4) ada pengukuran hasil dan umpan balik. Dengan kata lain, perencanaan strategis merupakan keputusan, bersifat antisipatif, dan proses pengukuran yang harus dilakukan setelah renstra tersebut dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan dapat dijadikan sebagai upaya untuk melihat sampai sejauh mana tingkat kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi.

Pedoman penyusunan Lakip yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara, sebagaimana yang dikutip oleh Riyadi-Bratakusumah (2004, h,279), dikemukakan bahwa “Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang dan atau mungkin timbul". Menurut *Olsen* dan *Eadie* sebagaimana yang dikutip oleh Riyadi-Bratakusumah (2004, h.280), perencanaan strategis (renstra) adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau antitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal-hal seperti itu.

Pengertian itu menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan. Pertama, keputusan strategis juga merupakan keputusan mendasar (fundamental), sehingga keduanya tidak saling membawahi. Kedua, keputusan strategis merupakan keputusan yang spesifik yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas. Ketiga, ada batasan lingkup dari perencanaan strategis dalam politik dan konstitusi yang berbeda dengan sektor swasta. Dengan demikian idealnya perencanaan strategis tidak menjadi bagian dari pendekatan politik dan birokrasi melainkan harus sudah melekat di dalamnya.

Berdasarkan pandangan tersebut, *Olsen* dan *Eadie* sebagaimana yang dikutip oleh Riyadi Bratakusumah (2004, h.280-281) mengemukakan bahwa dalam proses perumusan perencanaan strategis harus meliputi komponen-komponen dasar yang terdiri dari :

1. Pernyataan misi dan tujuan umum (*overall mission and goals statement*), yang dirumuskan oleh para pemimpin (eksekutif) manajemen dan menekankan pemikiran strategis yang dikembangkan dengan target-target ke depan.
2. Analisis lingkungan (*environmental scan or analysis*), dengan mengidentifikasi dan menilai serta mengantisipasi faktor-faktor eksternal dan kondisi yang harus diperhitungkan untuk bahan memformulasikan strategi organisasi.

3. Memeriksa keadaan dan sumber daya internal (*internal profile and resource audit*), dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan strategis.
4. Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi (*the formulation, evaluation, and selection of strategies*)
5. Melaksanakan dan mengevaluasi rencana strategis (*the implementation and control of the strategic plan*)

Sekilas pengertian mengenai perencanaan strategis tidak berbeda dengan perencanaan jangka panjang. Namun secara substansi, Bryson sebagaimana yang dikutip oleh Riyadi Bratakusumah (2004, h.284) memberikan gambaran dengan mengemukakan penjelasan mengenai pembedaannya, yaitu :

1. Renstra berfokus pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, sedangkan perencanaan jangka panjang/komprehensif, berfokus pada pengkhususan tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) serta menerjemahkan ke dalam anggaran dan program kerja.
2. Renstra lebih menekankan penelitian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi, memperkirakan kecenderungan baru, diskontinuitas, dan pelbagai kejutan (*Ansof, 1980*); sedangkan perencanaan jangka panjang cenderung menganggap bahwa kecenderungan masa kini akan berlanjut hingga masa depan. Renstra lebih mendorong perubahan yang bersifat kualitatif.
3. Renstra lebih mungkin untuk mengumpulkan visi yang diidealkan dalam organisasi, “Visi Keberhasilan” (*Taylor, 1984*) dan mengusahakan bagaimana dapat tercapai, ketimbang perencanaan jangka panjang. Renstra acapkali mencerminkan perubahan kualitatif, sedangkan rencana jangka panjang biasanya merupakan eksplorasi garis lurus (*linier*) dari keadaan sekarang, yang kerap kali diwujudkan dalam pernyataan tujuan untuk mewakili proyeksi mengenai kecenderungan yang terjadi.
4. Renstra lebih berorientasi pada tindakan (*action oriented*), dan biasanya mempertimbangkan suatu tentang masa depan yang mungkin dan terfokus pada implikasi keputusan dan tindakan masa sekarang. Renstra berupaya menangkap sebanyak mungkin peluang yang terbuka bagi organisasi agar dapat menanggapi kemungkinan yang tak terduga dengan efektif. Sedangkan rencana jangka panjang cenderung mengansumsi masa depan yang paling mungkin, dan kemudian mundur guna merumuskan urutan keputusan dan tindakan yang diperlukan, sehingga terpaksa pada arus tunggal dalam keputusan dan tindakannya.

Keseluruhan pendapat yang telah dipaparkan di atas ditemukan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai prinsip-prinsip umum perencanaan strategis, sebagaimana yang dikatakan oleh Riyadi Bratakusumah (2004, h.291) yaitu :

1. Perencanaan strategis harus bersifat *antisipatif* terhadap berbagai permasalahan yang ada di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi masa sekarang untuk mengatasinya (*Oriented masa depan*).
2. Perencanaan strategis harus berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*) dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi sebagai rel yang harus dijalankan secara konsisten.
3. Perencanaan strategis harus menggambarkan apa yang ingin dicapai di masa depan oleh suatu organisasi ke arah peningkatan produktivitas dan kinerja (*vision reflection*).
4. Perencanaan strategis harus memperhitungkan kemampuan internal dan kondisi eksternal (*take into account the internal capability and external capacity*).
5. Harus ada komitmen dan consensus untuk melaksanakannya secara konsisten sebagai hasil proses pengambilan keputusan bersama (*commitment and consensus to implementation*).
6. Harus mencerminkan prioritas tindakan dalam upaya pencapaian hasil secara optimal (*priority to actions*).
7. Perencanaan strategis dalam prosesnya harus mempertimbangkan input-input dari *stakeholders* atau *client groups* (*get inputs from stakeholders and client group*).
8. Harus memperhitungkan aspek keuangan untuk melaksanakannya.

#### a. Cara Merumuskan Renstra

Untuk melakukan perumusan perencanaan strategis dapat ditempuh dengan berbagai cara. Menurut *Morrissey* (1997) sebagaimana yang dikutip oleh Riyadi Bratakusumah (2004, h.295-296), ada tiga fase perencanaan, yaitu :

1. Fase Pemikiran Strategis,  
 Dalam fase ini dirumuskan komponen-komponen renstra dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Merumuskan nilai-nilai strategis organisasi
  - b. Menembangkan misi organisasi
  - c. Merumuskan visi organisasi
  - d. Mengembangkan strategi organisasi. Strategi dalam konteks ini adalah untuk menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi, bukan cara untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu dapat pula



dimaksudkan dengan strategi umum yang mengandung arah kebijakan organisasi.

2. Fase Perencanaan Jangka Panjang, yang di dalamnya terdiri dari proses:

- a. Area Strategis Kunci
- b. Analisis Isu Kritis
- c. Sasaran Jangka Panjang
- d. Rencana Tindakan Strategis

3. Fase Perencanaan Taktis, yang meliputi:

- a. Area Hasil Kunci
- b. Analisis Isu Kritis
- c. Indikator Kinerja Kunci
- d. Sasaran
- e. Rencana Tindakan
- f. Peninjauan Rencana

Fase pemikiran strategis merupakan tahapan dimana perencanaan dituntut

untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai macam kondisi secara intuitif,

yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk pernyataan nilai-nilai strategis, visi,

misi, dan strategis. Hasil pemikiran strategis ini menggambarkan suatu kondisi

yang diharapkan dapat dicapai dan dianut secara konsisten serta penuh komitmen.

Fase perencanaan jangka panjang adalah fase untuk menterjemahkan visi,

misi, dan strategi sehingga lebih mengarah pada upaya untuk mewujudkannya

menjadi hasil yang nyata. Dalam proses ini terjadi keseimbangan antara intuisi

dan analisis, sehingga lebih mengarah pada upaya untuk menentukan posisi yang

perlu dicapai oleh organisasi. Perencanaan jangka panjang seringkali dianggap

sinonim dengan perencanaan strategis, namun dalam prakteknya selama ini

perencanaan jangka panjang yang diterapkan dalam suatu organisasi, termasuk

organisasi publik (pemerintah), cenderung lebih bersifat *ekstrapolasi* masa

lampau, maksudnya perencanaan yang dilakukan selalu didasarkan pada apa yang

sudah dilakukan lima atau beberapa tahun sebelumnya, kemudian diproyeksikan

kembali dengan melakukan beberapa penyesuaian.

Fase perencanaan taktis merupakan fase perencanaan terakhir dalam konteks perencanaan strategis gaya *Morrisey*. Dalam fase ini, keseluruhan proses perencanaan selain didasarkan pada hasil-hasil fase sebelumnya, juga dipertajam kembali dengan spesifikasi substansi (lebih mengerucut) dengan cakupan yang lebih teknis dan operasional. Perencanaan taktis yang dirumuskan dengan baik akan berisi dokumen yang mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, bagaimana hal ini berlangsung, dan kapan dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perencanaan taktis menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita atau harapan menjadi kenyataan.

#### **b. Komponen-komponen Umum Renstra**

Menurut Riyadi Bratakusumah (2004, h.299-305), komponen-komponen umum yang perlu ada dalam renstra antara lain adalah :

1. Pernyataan nilai-nilai strategis operasional
2. Pernyataan visi
3. Pernyataan misi
4. Analisis lingkungan strategis
5. Merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan
6. Merumuskan tujuan dan sasaran organisasi
7. Menetapkan strategi operasional

Sebagaimana yang dikatakan oleh Riyadi Bratakusumah (2004, h.299) bahwa salah satu faktor yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan strategis adalah, "Nilai-nilai strategis organisasi diperlukan sebagai landasan filosofis yang harus dianut oleh setiap komponen organisasi dan mengikat secara emosional sebagai bentuk komitmen seluruh anggota organisasi." Nilai-nilai strategis organisasi biasanya berupa komitmen, keteguhan, etika, kejujuran, kepercayaan, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan

moril kepada seluruh anggota organisasi, agar mereka memiliki dasar filosofis yang dianut dan dipegang bersama. Nilai-nilai tersebut hendaknya dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan benar-benar mencerminkan sesuatu yang diperlukan oleh organisasi.

Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang akan menjadi arah bagi gerak sebuah organisasi. Visi harus logis, rasional, dan dapat dicapai. Meskipun tidak ada literatur yang mengharuskan secara mutlak mengenai jangka waktu sebuah visi, tetapi disarankan visi hendaknya dirumuskan untuk jangka waktu yang tidak pendek, misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau lebih, selama sekuensnya biasa terjamin.

Misi merupakan sesuatu yang dirumuskan untuk menggerakkan organisasi. Pergerakan organisasi melalui misi harus mengarah pada pencapaian visi, maka misi harus dirumuskan dengan memperhatikan visi, sehingga tergambar apa sebenarnya yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dengan apa melakukannya, dan dengan siapa yang bertanggung jawab. Rumusan misi hendaknya berupa strategi atau tindakan yang akan dilakukan, namun masih bersifat general (umum) belum spesifik dan belum operasiopnal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Riyadi Bratakusumah (2004, h.299), "Bahwa renstra harus mengandung uraian tentang pernyataan visi dan misi organisasi sebagai panduan umum mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya."

Riyadi Bratakusumah (2004, h.299) menyatakan bahwa, "Analisis strategis perlu dirumuskan sebagai landasan untuk mencari bentuk upaya bertahap yang ditemukan oleh organisasi dalam rangka melaksanakan berbagai

aktivitasnya. Dalam hal ini arah kebijakan dan prioritasnya harus sudah bisa tergambaran.” Oleh karena itu analisis lingkungan strategis dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal.

Pengidentifikasi ini difokuskan pada hal-hal yang diperkirakan dapat mempengaruhi gerak maju organisasi. Bila visi dan misi dirumuskan lebih dulu, maka harus menjadi panduan dalam melakukan analisis lingkungan strategis.

Hasil dari analisis ini harus mampu merumuskan strategi umum organisasi, dimana hasil rumusannya dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis.

Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan ditunjukkan untuk memberikan gambaran konkret mengenai faktor apa saja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat melaksanakan rencana dengan baik (Riyadi Bratakusumah, 2004, h.303). Perumusan ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang ada atau tertuang dalam strategi umum atau isu-isu strategis. Rumusan faktor-faktor kunci keberhasilan harus dibuat dalam bentuk pernyataan dengan maksud untuk memberikan kejelasan dan batasan mengenai kondisi faktor yang diinginkan, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang jauh berbeda dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Riyadi Bratakusumah (2004, h.299) menyatakan bahwa, “Strategi operasional dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang terpolakan dalam periode waktu tertentu akan menjadi landasan operasional organisasi untuk bergerak mencapai arah yang ditetapkan.” Strategi operasional merupakan strategi yang dibuat dalam bentuk rencana tindakan yang akan dilakukan untuk

mengimplementasikan renstra. Rencana tindakan ini disusun berdasarkan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dan harus sudah operasional, artinya sudah mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu, biasanya 5 tahunan. Selain itu rencana tindakan juga sudah terumuskan secara bertahap dalam setiap tahunnya. Periode tahunan disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga dari keseluruhan strategi yang ada akan terlihat apa sebenarnya yang ingin dicapai dan prioritas apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya.

### c. Manfaat Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis memiliki banyak sekali manfaat apabila kita mampu menyusun dan menerapkannya dengan baik. Apapun cara dan model yang dipakai, perencanaan strategis merupakan alat perencanaan yang berorientasi ke masa depan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan yang strategis yang terjadi pada masa kini dan mungkin terjadi pada masa datang. Perencanaan strategis akan menjamin terjaganya eksistensi organisasi dengan peningkatan produktivitas dan kinerja (hasil), sehingga mampu bersaing dengan organisasi lain yang serupa.

Menurut Riyadi Bratakusumah (2004, h.308), manfaat umum perencanaan strategis yaitu :

1. Sebagai alat bagi pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk membangun arah tujuan organisasi dalam jangka panjang.
2. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja.
3. Menciptakan rasa tanggung jawab dan mendorong komitmen dari seluruh anggota organisasi pada semua tingkatan.

4. Senantiasa mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis.
5. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama.
6. Mengembangkan sifat fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi organisasi.
7. Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis baik kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan aktivitas organisasi (pelayanan).
8. Membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga akan mendorong sifat proaktif dalam bergerak.

Teori mengenai perencanaan strategis di atas selanjutnya akan penulis gunakan untuk menganalisis strategi Disperindag dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulangin dalam mengatasi bencana lumpur lapindo.

#### **d. Rencana Strategis Diskoperindag Sidoarjo**

Diskoperindag dalam rencana strategi pengembangan industri kecil Sidoarjo 2009, menetapkan tujuan dan sasaran memberdayakan usaha kecil khususnya pada industri tas dan koper Tanggulangin yang selama ini mengalami penurunan omzet, antara lain :

3. Tujuan
  - d. Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup pengusaha.
  - e. Terpenuhinya barang dan jasa di pasaran dalam jumlah dan harga yang terjangkau.
  - f. Terlindunginya konsumen dari pemakaian produk.
4. Sasaran
  - f. Meningkatnya kemampuan pengusaha industri dan perdagangan dalam mengelola usahanya.
  - g. Meningkatnya peluang usaha bagi pengusaha untuk mendapatkan peluang yang lebih besar.
  - h. Meningkatkan pemasaran produk.
  - i. Lancarnya pengadaan dan penyaluran barang dagangan.
  - j. Meningkatnya perlindungan konsumen.

Untuk mencapai tujuan / sasaran maka ditetapkanlah kebijakan dan program rencana strategis, yaitu :

3. Kebijakan internal

- d. Memfasilitasi pengusaha untuk mendapat peluang yang lebih besar.
- e. Peningkatan kepuasan pelayanan dan perluasan pasar melalui media informasi dan promosi
- f. Pendayagunaan potensi daerah yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan.

4. Kebijakan eksternal

- e. Dukungan permodalan berupa pinjaman uang dengan bunga lunak dari bank pemerintah maupun swasta.
- f. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait yang saling mendukung dalam pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan.
- g. Peningkatan jumlah bantuan industri kecil dan menengah dan dana bergulir secara kontinyu.
- h. Iklim dan geografi kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang ditangani oleh industri dan perdagangan.

Dari beberapa program rencana strategi di atas, hanya dua program yang di implementasikan pada industri kecil tas dan koper Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo yaitu pembinaan desain produk dan pembinaan dalam bidang promosi, dengan tujuan agar dapat menghidupkan kembali usaha kerajinan tas dan koper Tanggulangin setelah terkena dampak dari bencana lumpur lapindo.

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Istilah pemberdayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai: “berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai cara untuk melakukan sesuatu, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak”.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat yang dalam

kondisi ketidak berdayaan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian (Jurnal Administrasi Publik, 2004, h.60). untuk lebih jelasnya disebutkan pula bahwa pemberdayaan itu berkaitan dengan berbagai upaya membangun kondisi masyarakat yang member keleluasaan kepada warga masyarakat untuk mengembangkan kualitasnya dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Selain itu Sedarmayaanti (2007:285) juga mengungkap definisi mengenai pemberdayaan yakni: "*Empowerment*/pemberdayaan asal dari kata "*power*" yang artinya "*control, authority, dominion*". Always "*emp*" artinya "*on put to*" atau "*to cover with*" jelasnya "*more power*". Jadi Empowering artinya *is passing an authority an responsibility*, yaitu lebih berdaya daripada sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya".

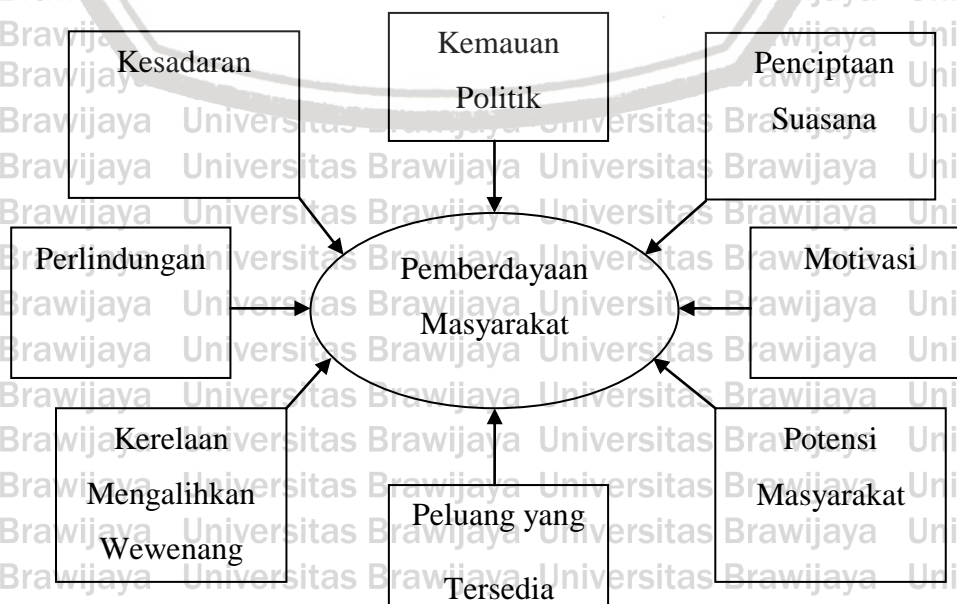
Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan menurut Perkins sebagai suatu proses sengaja yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling menghormati, refleksi krisis, kepedulian, dan partisipasi kelompok, dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumber daya tersebut (Perkins dalam Randy, 2007:179). Sementara itu Ife (1995:182) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan dan komunikasi mereka.



Dari berbagai pengertian-pengertian pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan dimaksudkan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang berupa fisik, ekonomi maupun social.

Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah (Suhendra, 2006:87):

- a. Kemauan politik yang mendukung.
- b. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh.
- c. Motivasi.
- d. Potensi masyarakat.
- e. Peluang yang tersedia.
- f. Kerelaan mengalihkan wewenang.
- g. Perlindungan.
- h. Kesadaran.



Gambar 1 : Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat (Sumber: Suhendra, 2006:87).

Berdasarkan penjelasan di atas, makna hakiki pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat "*people centered, participatory, empowering and sustainable*" (masyarakat yang terpusat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan).

## 2. Tahapan Pemberdayaan

Dalam upaya memberdayakan masyarakat akan lebih sesuai apabila disertai dengan proses-proses yang mendasari beberapa tahapan dalam pemberdayaan.

Menurut pendapat Pranaka & Vidhyandika (1996), menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua, atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Kertasasmitha (1996:74) upaya pemberdayaan dilakukan melalui tiga arah, yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi (berdaya) untuk berkembang
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan penyediaan input (masukan) serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang
- c. Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi lemah

Berdasarkan hal tersebut Kertasasmitha, 1996) mengembangkan beberapa pendekatan yang mungkin bisa diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan yaitu :

- a. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (*targeted*) atau pemihakan kepada yang miskin atau lemah
- b. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama.
- c. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan pembentukan kelompok masyarakat yang dilakukan oleh pendamping yang sifatnya lokal, teknis dan khusus.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu adanya suntikan modal, penguatan intuisi, pembangunan prasarana dasar. Hal ini berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat. Untuk sampai pada ketiga

sasaran di atas maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan (Prasodjo dan Pranaraka, 1996:2), yaitu :

- a. Inisialisasi, yaitu pemberdayaan dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat
- b. Partisipatoris, pemberdayaan dari pemerintah bersama rakyat, dan untuk rakyat
- c. Emansipatoris, pemberdayaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah.

Pada tahap ketiga ini, masyarakat sudah menemukan eksistensi dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan – pembaharuan pembangunan dalam mengaktualisasikan diri atas emansipatoris, kegiatan pemberdayaan masyarakat telah mencapai puncaknya dan untuk merealisasikan diperlukan persyaratan pokok yaitu :

- a. Perencanaan pembangunan, dimana perencanaan pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat adalah mengarah pada strategi dasar pemberdayaan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan dan strategi ini memiliki tiga arah (Sumodiningrat, 1996:34), yaitu :
  - 1) Perencanaan dan pemberdayaan masyarakat
  - 2) Pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.

3) Modernisasi melalui peminjaman dan pemantapan arah perubahan struktur social dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

b. Pelaksanaan program pembangunan yang berwajah.

Masyarakat memiliki ciri antara lain :

- 1) Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat lemah
- 2) Pelaksanaan harus dilakukan masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan.
- 3) Karena masyarakat lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri, akibatnya kurangnya keberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (*cooperative*)
- 4) Mengerahkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk masyarakat yang mampu lainnya, organisasi masyarakat termasuk LSM, Perguruan Tinggi lainnya

### 3. Strategi Pemberdayaan

Personal *et.al.* dalam Suharto (2005:66) menyatakan bahwa pada umumnya proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektifitas.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan

kolektivitas dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sitem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan social, pemberdayaan dapat dilakukan melalui asas atau mantra pemberdayaan (*empowering setting*), yaitu :

a) Azas Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, *stress management, crisis intervention*. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*)

b) Azas Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok lain sebagai media intervensi melalui pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok.

c) Azas Makro

Disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sitem lingkungan yang lebih luas. Strategi ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahamim situasi- situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan menurut Notoatmodjo (1998 : 11-13) antara lain :

a. Faktor Internal

Factor internal mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pemimpin maupun anggota organisasi bersangkutan. Secara rinci factor-faktor tersebut adalah :

1) Misi dan tujuan organisasi

Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik, serta implementasi perencanaan secara tepat. Pelaksanaan program organisasi dalam mencapai tujuan ini diperlukan kemampuan tenaga, dan ini hanya dapat dicapai dengan pengembangan SDM dalam organisasi tersebut.

2) Strategi pencapaian tujuan

Misi dan tujuan organisasi mungkin mempunyai strategi yang berbeda. Untuk itu diperlukan kemampuan pegawainya dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan diluar yang mempunyai dampak terhadap organisasi. Sehingga strategi yang disusun dapat memprhitngkan dampak yang akan terjadi terhadap organisasinya.

3) Sifat dan jenis kegiatan

Sifat dan jenis kegiatan sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola pengembangan SDM akan berbeda dengan organisasi yang melaksanakan kegiatan bersifat ilmiah.

#### 4) Jenis teknologi yang digunakan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM dalam organisasi tersebut baik untuk mempersiapkan tenaga guna menanggapi pengoperasionalan teknologo itu ataupun mungkin otomatisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia

#### b. Faktor Eksternal

Organisasi itu berada dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana organisasi tersebut berada. Agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuan maka ia harus memperhitungkan factor lingkungan maupun faktor eksternal organisasi tersebut. Factor-faktor tersebut adalah :

##### 1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan – kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri dan sebagainya adalah arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan tersebut sudah pasti akan berpengaruh terhadap program pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan

##### 2) Sosio – budaya Masyarakat

Faktor sosio-budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh organisasi. Hal ini dapat dipahami karena organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya berbeda-beda



### 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Di luar organisasi dewasa ini telah sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu organisasi yang baik dapat mengikuti perkembangan tersebut, oleh karena itu organisasi harus mampu memilih teknologi yang tepat serta kemampuan pegawai yang harus diadaptasikan dengan kondisi tersebut.

## 5. Permasalahan Dalam Pemberdayaan

Meskipun secara umum sudah terdapat kesepakatan akan adanya pemberdayaan masyarakat, namun terdapat beberapa permasalahan dalam mempraktekannya. Permasalahan menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai definisi pemberdayaan, batasan masyarakat yang sukses melakukan pemberdayaan. Beberapa permasalahan yang menyangkut dengan pemberdayaan menurut Prasodjo (2004 : 11) meliputi :

- a. Diskontinuitas dan dikoordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadic. Dalam hal ini kebijakan pemerintah seringkali berseberangan dengan pendampingan yang dilakukan oleh LSM
- b. Disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan bantuan kosultan terkadang tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang dipergunakan oleh kosultan tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

c. Disorientasi, pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan proses waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan adanya dan munculnya masalah baru dan hasil yang belum nyata sehingga membuat pemerintah dan LSM sebagai fasilitator mengubah arah kebijakan.

d. Generalisasi, yaitu perbedaan budaya, social, dan politik di Indonesia yang merupakan kekayaan dan tak ternilai harganya . dengan kemajemukan tersebut hendaknya pemerintah melakukan pendekatan dan pemberdayaan yang dinamis dengan memperhatikan nilai – nilai dasar masyarakat.

e. Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan hukum, Undang-Undang mengenai pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat kaku dan berdasarkan Surat Keputusan, Petunjuk Teknis, dan Petunjuk Pelaksanaan dapat menghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini mempersulit petugas di lapangan yang sewaktu – waktu menghadapi permasalahan dalam prakteknya dan tidak sesuai dengan peraturan atau hokum di masyarakat.

Akibatnya tujuan pemberdayaan masyarakat tidak dapat tercapai, karena petugas hanya berpedoman pada peraturan daripada realita yang terjadi dalam masyarakat.

f. Indikator yang tidak tepat, karena selama ini pemberdayaan hanya diukur dalam bentuk fisik, komoditas barorientasi pada input dan mkualitatif daripada non fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

## C. Industri Kecil

### 1. Pengertian Industri kecil

Sebelum menjabarkan tentang pengertian industri kecil, terlebih dahulu akan disampaikan tentang pengertian dari industri. Istilah industri mempunyai dua arti. Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Kedua, industri dapat pula merujuk pada ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy,1996:227).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa industri memiliki arti sebagai “perusahaan atau pabrik yang menghasilkan barang-barang” (Daryanto,1997:282). Sedangkan menurut UU No 5 Tahun 1984, industri didefinisikan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Di Indonesia, belum ada batasan mutlak tentang industri kecil yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum. Pengertian industri kecil masih bermacam-macam. Hal ini dikarenakan masing-masing kalangan yang terkait dengan industri kecil, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun ilmuwan memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai konsep industri kecil ini.

Bahkan istilah yang dipakai pun bermacam-macam seperti industri formal,

usaha kecil, industri rumah tangga, industri kecil atau usaha sub sistem.

Namun pada dasarnya mempunyai makna substansi yang sama.

Batasan normatif menurut SK. Memperindag Nomor 254 Tahun 1997, industri kecil diartikan sebagai suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil tergolong usaha kecil. Oleh karena itu perlu batasan yang tegas tentang pengertian usaha kecil. Hal ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi pemahaman atas kedua konsep tersebut.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah suatu usaha yang mempunyai kekayaan bersih maksimum 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan atau mempunyai omset penjualan maksimum 1 miliar rupiah per tahun.

Menurut Disperindag bersama dengan Badan Pusat Statistik (2002) industri kecil adalah:

“kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 miliar rupiah atau kurang”.

Merujuk kepada beberapa pengertian industri yang telah diuraikan tersebut, maka pada prinsipnya industri itu terkait dengan unsur-unsur tertentu, antara lain:

- a. Kelompok-kelompok perusahaan atau kelompok produksi yang mengolah barang homogen atau sejenis.

- b. Perubahan wujud fisik suatu benda, baik melalui proses mekanik maupun kimia dengan melibatkan faktor-faktor produksi.
- c. Orientasi kegiatan industri dititikberatkan kepada dua target yang mendasar, yakni 1) untuk mendapatkan manfaat/nilai yang lebih dari semula, dan 2) sebagai jawaban alternatif atas kelangkaan suatu produk dengan cara substitusi.

Pada instansi lain, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan bank Indonesia memberikan batasan industri kecil atas dasar besarnya aset yang ditanamkan. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksudkan dengan industri kecil adalah “usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp 600 juta”. Sedangkan menurut Kadin, industri kecil adalah “usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600 juta”.

Pengertian-pengertian yang ada itu kemudian dipertegas lagi oleh Minzerg seperti yang dikutip Sutujo dkk (1994:2) yang memberikan batasan sektor usaha kecil yaitu sebagai berikut:

“Organisasi yang memiliki enterprenual organization, dengan cirri-ciri antara lain “Struktur organisasinya yang sangat sederhana, karakteristiknya khas, biasanya tanpa staf yang berlebih, pembagian kerja yang kendur, dan memiliki hirarki manajer yang kecil. Aktivitas mereka hanya sedikit dan diformalkan, sangat sedikit menggunakan proses perencanaan, dan jarang sekali mengandalkan pelatihan dan manejer mereka. Ciri lainnya adalah pada umumnya sektor usaha kecil sulit membedakan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Mereka juga kurang baik sistem administrasinya. Para pengusaha perusahaan kecil dan menengah memiliki sifat dalam menghadapi investasi hampir sama dengan perorangan.

Dari berbagai macam pengertian tentang industri kecil di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri kecil merupakan suatu kegiatan produksi atas suatu barang yang memiliki karakteristik yang khas, diantaranya baik dari segi jumlah nilai aset maupun karyawan yang kecil. Struktur organisasi yang sederhana, manajemen yang lemah, serta keterbatasan-keterbatasan yang lain seperti lingkup pemasaran yang biasanya bersifat lokal.

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan oleh beberapa lembaga dengan kriteria yang berbeda. Biro Pusat Statistik membedakan skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu :

1. Industri besar : bepekerja 100 orang atau lebih
2. Industri sedang : bepekerja antara 20 sampai 99 orang
3. Industri kecil : bepekerja antara 5 sampai 19 orang
4. Industri/kerajinan rumah tangga : bepekerja <5 orang

Banyak pihak yang memberikan paparan yang beraneka ragam mengenai industri kecil ini. Untuk itu perlu diberi batasan tentang kriteria industri kecil, yaitu dari segi jumlah tenaga kerja, besarnya modal, kapasitas produksi serta besarnya tingkat penjualan per periode.

Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil memberikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar
3. Memiliki warga negara Indonesia

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau beralifiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hokum atau badan usaha yang berbdan hokum, termasuk koperasi (B.N. Marbur, 1996;116)

Sementara pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri keuangan RI No 316/KMK.016/1994 memberia batasan bahwa usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan pertahun setinggi-tingginya Rp 600 juta (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari :

- a. Badan usaha (CV, PT dan Koperasi)
- b. Perorangan (pengrajin, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa dan sebagainya)

Semua ciri khas yang melekat erat pada industri kecil maka memberikan satu kesimpulan bahwa dalam industri kecil terdapat masalah pokok yang melekat pda industri kecil ini, yaitu : rendahnya kualitas SDM (pengusaha dan pekerja), rendahnya akses permodalan, terbatasnya akses informasi, pasar dan jaringan usaha, serta rendahnya daya saing produk.

Industri kecil yang ada memiliki berbagai macam profil bentuk usaha.

Untuk memudahkan dalam rangka pembinaannya, maka industri kecil dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Industri lokal  
Adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas serta relatif tersebar dari segilokasinya.
2. Industri sentra  
Adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan

kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan usaha yang menghasilkan barang sejenis.

### 3. Industri mandiri

Adalah kelompok jenis industri yang masih mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih. (Irsan Azhari Saleh, 1986:50)

Menurut A.R. Soehoed (1982:135) menyampaikan pengelompokan industri kecil berdasarkan pemasaran produknya dibagi dalam empat, yaitu :

1. Industri yang menghasilkan produk-produk (komponen-komponen) bagi industri menengah dan besar
2. Industri yang menghasilkan barang-barang jadi untuk pasar-pasar umum
3. Industri kecil yang lebih tepat lagi kerajinan yang membuat barang-barang yang bercitra seni, umumnya untuk daerah pariwisata
4. Industri kecil atau yang lebih tepat lagi industri pedesaan yang memberikan jasa dan membuat barang untuk pemesanan terbatas di wilayah pedesaan.

Dari beberapa pengelompokan yang ada, Isono Sadoko (1995:38-39)

mempertegas pengelompokan industri kecil berdasarkan heterogenitas dari beberapasegi sebagai berikut :

- a. Sektoral  
Usaha terdiri dari bermacam-macam jenis usaha (produksi) dan jasa
- b. Strategi dan motivasi  
Pengusaha kecil diklasifikasikan menjadi usaha-usaha untuk bertahan hidup, adaptasi dan akumulasi, sumber penghasilan tambahan, spesialisasi atau diversifikasi.
- c. Lokasi  
Usaha kecil banyak terdapat diperkantoran dan pedesaan baik berupa usaha yang tidak menetap maupun yang menetap baik secara terpisah maupun beraglomerasi
- d. Latar belakang perusahaan  
Tingkat pendidikan yang beragam dari segi teknis hingga nonteknis, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak-anak hingga orang dewasa, sebagai kepala rumah tangga maupun anggota keluarga, status sipil. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan kelompok etnis maupun asal daerah dan lainnya.
- e. Orientasi terhadap pasar  
Produsen yang berorientasi ke pasar konsumen, atau kepada usahamenengah ke atas, termasuk juga jasa membersihkan kantor



atau perbaikan peralatan pemerintah, atau usaha pengantara dalam proyek pembangunan atau perindustrian.

f. Orientasi terhadap pasar tenaga kerja

Menggunakan tenaga kerja yang berupah atau tidak berupah dengan pola rekrutmen tenaga kerja dari lingkungan keluarga, tetangga setempat atau daerah asal.

g. Orientasi pada pasar keuangan

Pola pembentukan berasal dari pola sendiri, pinjam dari keluarga atau lingkungan rumah tangga, arisan, rentenir, BPR, koperasi, kelompok simpan pinjam, kelompok usaha bersama dan lain-lain.

## 2. Peranan Industri kecil Dalam Pembangunan

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia industri kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

Industri kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Industri kecil terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. (Mohammad jafar hafsa, 2004:40)

Menurut Irsan Azhary Saleh (1986:5) menyatakan bahwa industri kecil juga member peranan yang sangat berarti dalam pembangunan perekonomian. Pertama : industri kecil dapat menciptakan peluang berusaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah. Hal ini sejalan dengan

kenyataan bahwa tingkat keahlian dan daya dukung permodalan dari pengusaha di negara-negara ASEAN pada umumnya masih rendah. Kedua : industri kecil turut mengambil peranan penting dalam peningkatan dan mobilitas tabungan domestik. Ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa industri kecil cenderung memperoleh modal dari tabungan si pengusaha sendiri, atau dari tabungan keluarga dan kerabatnya. Ketiga : industri kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang, karena industri kecil menghasilkan produk yang relatif murah dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar dan sedang.

Sektor industri telah berperan sebagai penggerak utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan meningkatkan produktivitas masyarakat. Disamping itu pembangunan industri juga berperan menciptakan lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan serta pemeratakan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Proses industrialisasi juga penting dalam mendukung berlangsungnya perubahan tata nilai masyarakat dan pranata sosial yang lebih dinamis dan berkualitas. Sektor industri telah menyumbang porsi utama dalam pendapatan devisa negara pada porsi yang lebih besar, meningkatkan pendapatan nasional, menyerap tenaga cukup banyak, sementara kondisi sosial dan budaya masyarakat telah menjadi masyarakat industri (Laporan Perencanaan Tupoksi Disperidag 1997/1999).

Dengan demikian dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan sektor industri kecil dalam pembangunan sangat besar terutama dalam pembangunan perekonomian. Peranan industri yang sangat besar terdapat dalam penyerapan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran nyata Implementasi Renstra Diskoperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangin Pasca Bencana Lumpur Lapindo, serta kecenderungan pencapaian hasil program, oleh karena itu jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Moleong (2004:11) menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan batas atau ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat lebih jelas. Fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil tas dan koper Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo, yang di dalamnya meliputi:

a. Peran Diskoperindag Dalam Memberdayakan Industri Kecil Pasca

Bencana Lumpur Lapindo :

1) Pembinaan Desain produk

2) Pembinaan Dalam Bidang Promosi

b. Perkembangan tingkat pendapatan pengusaha melalui kegiatan

pemberdayaan industri kecil tas dan koper dilihat dari segi produksi.

c. Tingkat kepuasan konsumen dari pemakaian produk dilihat dari segi

kualitasnya.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi

rencana strategis diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil

tanggulagin khususnya pada industri tas dan koper, yang di dalamnya

meliputi:

a. Faktor internal dari implementasi rencana strategis

b. Faktor eksternal dari implementasi rencana strategis

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengadakan

penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti

mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-

benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti juga diharapkan dapat menangkap

keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi,

lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Adapun yang menjadi

lokasi penelitian disini adalah Kecamatan Tanggulagin sebagai wilayah studi

dengan menitik beratkan pada kawasan yang menjadi Sentra Industri Kerajinan Kulit Desa Kedensari. Adapun batas administrasi wilayah studi dalam penelitian ini, yaitu :

Batas Selatan : Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon

Batas Utara : Kecamatan Candi

Batas Timur : Kecamatan Jabon

Batas Barat : Kecamatan Tulangan

Sedangkan situs yang diteliti pada penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto no 9 *Sidoarjo*.

#### **D. Sumber Data**

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Sumber data sendiri merupakan seseorang yang bertindak sebagai informan yang sesuai untuk dijadikan atau dipilih sebagai sumber guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Sedangkan data-data tersebut harus digali dan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

##### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari wawancara

dengan responden di lapangan, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh antara lain dari: (a) Kantor Diskoperindag, Kabupaten Sidoarjo; (b) Pengrajin industri kulit; (c) serta wawancara dengan *stakeholders*

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen-dokumen, karya tulis ilmiah, makalah serta data pendukung lainnya yang mendukung data primer. Data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah data-data pendukung mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data tergantung kepada kualitas alat pengukur atau alat pengambil data serta kualifikasi orang yang mengambil data. Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Peneliti harus menerima menurut apa adanya. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah:

### 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan narasumber atau informan. Maksud dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) tentang obyek penelitian yang memadai secara langsung dari

kata-kata dan tindakan informan, kemudian data dan hasil wawancara tersebut dicatat.

## 2) Observasi

Melakukan pengamatan terhadap tanggapan, sikap, perilaku dan pemikiran dari kelompok sasaran terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil produksi. Observasi di lapangan dengan cara datang langsung ke lokasi yang menjadi sasaran, yaitu di Desa Kedensari, Kabupaten Sidoarjo.

## 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini berupa gambar-gambar, foto-foto, dan berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Dokumentasi kegiatan peneliti berupa lembar pertanyaan, rekaman wawancara serta foto-foto. Dokumentasi ini diperoleh selain dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengrajin industri kulit Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat (Arikunto, 2006:160). Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:



- 1) Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada proses wawancara dan analisis data. Serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
- 2) Pedoman wawancara merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan.
- 3) Perangkat penunjang lain yang berupa buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh di lokasi penelitian.

## G. Analisis Data

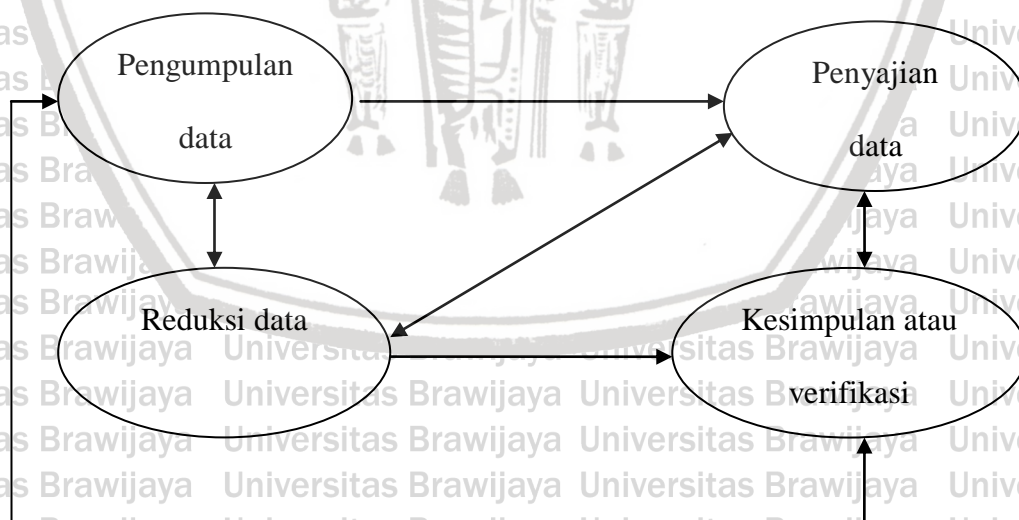
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa model interaktif (*interactive of analysis*) yang dikembangkan oleh (Miles dan Huberman, 1992:16) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu:

- 1) Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

2) Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti.

3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drwing*), yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal sering timbul dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentative*. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat mendalam, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Sistem kerja teknik analisa data model interaktif tersebut dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992:20):



Gambar 2 : Komponen-komponen Analisa Data Model Interaktif  
Sumber: Miles dan Huberman, (1992:20)

Dalam analisa data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya terus menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles and Huberman, 1992:16). Oleh karena itu, dalam penelitian ini setiap data-data diperoleh mengenai bagaimana eksistensi pengrajin industri tas yang dilaksanakan oleh *stakeholders*, dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dianalisis secara lebih mendalam sehingga memperoleh hasil penelitian yang memuaskan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Kondisi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo dan Sentra Industri Kecil Tas dan Koper Tanggulangin

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk kawasan Gerbang kertosusila, Sidoarjo sendiri berada di dataran rendah dan dikenal dengan sebutan kota delta karena diapit oleh dua sungai besar pecahan kali brantas yakni kali mas dan kali porong. Letak dari Kabupaten sidoarjo sendiri berada di selatan Surabaya dan secara geografis seolah olah menyatu.

Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokari. Sidokare dipimpin R. Notopuro (kemudian bergelar R.T.P Tjokronegoro) yang berasal dari

Kasepuhan. Ia adalah putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare, yang memiliki konotasi kurang bagus diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo terletak pada koordinat 112,5°-112,9° Bujur Timur dan 7,3°- 7,5° Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Luas Kabupaten Sidoarjo adalah 591,59 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas 80,998 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Sedati 79,430 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sidoarjo 62,560 km<sup>2</sup>.

#### **a. Topografi**

Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian. Meliputi 29,20%.

#### **b. Pemerintahan Daerah**

Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Secara administratif wilayah Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi dalam 18 kecamatan dan 31 kelurahan. Sepanjang tahun 2010 tidak terjadi

pemekaran ataupun penggabungan RW maupun RT. Dengan demikian jumlah RW dan RT masih sama dengan tahun 2009 yaitu 1786 RW dan 6377 RT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumber daya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo, maka visi Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai berikut:

1) *Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:*

"Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan"

2) *Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:*

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2010 - 2015 tersebut, ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo, "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan

kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Delapan misi utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
2. Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.
6. Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

### c. Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin

Nama Tanggulangin cukup dikenal sebagai Sentra Industri Kerajinan Kulit yang memproduksi berbagai macam tas, dompet, sepatu, jaket, dan lain sebagainya. Industri kerajinan rakyat tersebut berlangsung turunturun sejak 1933, yang kemudian berkembang pesat hingga berorientasi ekspor. Para pengusaha kecil dan menengah (UKM) tas dan koper di Tanggulangin tergabung dalam koperasi Industri Tas dan Koper (INTAKO) yang berdiri sejak 7 Januari 1976 dan memiliki 342 anggota yang semuanya merupakan para perajin tas dan koper, dan setiap perajin memiliki karyawan antara 5 hingga 20 orang. Kawasan Sentra Industri Kerajinan Kulit Tanggulangin juga sering menjadi tujuan masyarakat luar kota yang ingin membeli tas maupun produk kerajinan kulit lainnya.



Gambar 3: Peta Lokasi Kecamatan Tanggulangin

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo



Kecamatan Tanggulangin sebagai wilayah studi dengan menitik beratkan pada kawasan yang menjadi Sentra Industri Kerajinan Kulit yaitu; Desa Kludan dan Desa Kedensari. Adapun batas administrasi wilayah studi dalam penelitian ini, yaitu :

Batas Selatan : Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon

Batas Utara : Kecamatan Candi

Batas Timur : Kecamatan Jabon

Batas Barat : Kecamatan Tulangan

Eksistensi Sentra Kerajinan Kulit Tanggulangin dalam beberapa tahun belakangan ini terancam mati sejak Lumpur Panas Porong menyembur di Porong, Sidoarjo. Beberapa kecamatan yang bersebelahan dengan lokasi semburan lumpur ikut terkena getahnya. Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau Lumpur Panas Porong atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT LAPINDO Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006, bersamaan dengan gempa berkekuatan 5,9 SR yang melanda Yogyakarta. Meski luberan lumpur tak sampai menjilat lokasi sentra industri Tanggulangin, namun akses ke lokasi itu cukup terganggu. Penjualan mereka merosot drastis, tepat setelah terjadi luapan lumpur. Kini yang masih berproduksi tinggal 1.500-an pekerja. *(Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas*

*Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012)*

Tabel 1 : Kondisi Industri Kulit Tanggulangin

No.	Tahun	Unit	Tenaga Kerja	Omset (Rp)
1.	2010	100	950	Rp. 20juta/Bln
2.	2011	250	1100	Rp. 35juta/Bln
3.	2012	300	1500	Rp. 50juta/Bln

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, 2012

Pola pembiayaan yang digunakan adalah murah bahan (jual beli).

Dalam penyusunan pola pembiayaan dengan sistem syariah, Bank Indonesia memperoleh bantuan dari banyak pihak antara lain PT. Bank Syariah Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mega Indonesia dan berbagai nara sumber korespondensi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu industri rumahan yang sudah memperoleh pembiayaan adalah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 : Pola Pembiayaan Kerajinan Kulit Kabupaten Sidoarjo 2012

No.	Unsur pembiayaan	Uraian
1.	Jenis Usaha	Usaha Industri Kerajinan Kulit
2.	Lokasi usaha	Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
3.	Dana yang Diperlukan	Investasi = Rp259.339.000,- - Modal Kerja = Rp75.873.568,- - Total = Rp385.212.568,-
4.	Sumber Dana	Lembaga Keuangan Syariah dan modal sendiri

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, 2012

## 2. Gambaran Umum Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo

### a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### a. Kedudukan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi

Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, bidang perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 1) Tugas dan Fungsi Bagian Sekretariat

Bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis.

2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
3. Pengelolaan administrasi keuangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Tugas dan Fungsi Bidang Perindustrian

Bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perindustrian. Sedangkan fungsinya adalah:

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang industri agro kimia, industri logam, mesin dan tekstil, industri aneka dan elektronika.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang industri agro kimia, industri logam, mesin dan tekstil, industri aneka dan elektronika serta fasilitasi pelayanan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang industri agro kimia, industri logam, mesin dan tekstil, industri aneka dan elektronika serta pengawas pencegah pencemaran.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3) Tugas dan Fungsi Bidang Perdagangan

Bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perdagangan. Sedangkan fungsinya adalah:

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen, pembinaan perdagangan dan pemasaran.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen, pembinaan perdagangan dan pemasaran serta fasilitasi pelayanan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen, pembinaan perdagangan dan pemasaran serta fasilitasi pelayanan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **a. Rincian Tugas Masing – Masing Bidang**

Bagian Kesekretariatan mempunyai sub bagian yaitu:

##### **1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis.
2. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perijinan dan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM.
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
2. Melaksanakan pengelolaan barang.
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3) Sub Bagian Keuangan**

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
2. Mengelola administrasi keuangan.
3. Menyusun laporan pengelolaan keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **4) Bidang Perindustrian mempunyai Seksi yaitu:**

### **a) Seksi Industri Agro dan Kimia, bertugas untuk:**

1. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi terhadap industri agro kimia.
2. Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan industri agro dan kimia.
3. Melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri agro dan kimia.

4. Melakukan analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama bidang industri agro dan kimia dengan dunai usaha dan lembaga lainnya.
5. Memberikan pembinaan bimbingan teknis penanggulangan dan pengawasan pencegahan pencemaran limbah industri agro dan kimia.
6. Memberikan pertimbangan teknis bidang industri agro dan kimia.
7. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas industri agro dan kimia.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

**b) Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan Tekstil, bertugas untuk:**

1. Menyiapkan penyusunan progam dan koordinasi terhadap industri logam, mesin dan tekstil.
2. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil usaha industri, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri logam, mesin dan tekstil.
3. Melakukan analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama di bidang usaha industri logam, mesin dan tekstil dengan dunia usaha dan lembaga lainnya.

4. Memberikan bimbingan teknis penanggulangan dan pencegahan pencemaran limbah industri logam, mesin, dan tekstil.
5. Memberikan pertimbangan teknis bidang industri logam, mesin dan tekstil.
6. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas bina industri logam, mesin dan tekstil.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

**c) Seksi Industri Aneka dan Elektronika, bertugas untuk:**

1. Menyiapkan penyusunan program dan koordiansi terhadap industri aneka dan elektronika.
2. Melakukan analisa, evaluasi, dan inventarisasi kebutuhan sarana industri aneka dan elektronika.
3. Menyusun perencanaan dan program pengembangan penggunaan sarana industri aneka dan elektronika.
4. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan dan mutu hasil produksi penerapan standar dan pengawasan mutu diversifikasi dan inovasi teknologi industri aneka dan elektronika.
5. Memberikan bimbingan teknis penanggulangan dan pencegahan pencemaran limbah industri aneka dan elektronika.



6. Memberikan pertimbangan teknis bidang industri aneka dan elektronika.
7. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas industri aneka dan elektronika.
8. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang perindustrian.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**5) Bidang Perdagangan mempunyai Seksi yaitu:**

**a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, bertugas untuk:**

1. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi terhadap perdagangan dalam dan luar negeri.
2. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor impor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
3. Memantau pengadaan dan penyaluran serta perkembangan harga mata dagangan khususnya bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya.
4. Pembinaan pedagang kecil dan menengah.
5. Inventarisasi permasalahan, khususnya yang dihadapi eksportir.

6. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.
7. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan.
8. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.
9. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan.
10. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang).
11. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan impor.
12. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor.
13. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.
14. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di daerah.

15. Memberikan pertimbangan teknis bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
16. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas perdagangan dalam dan luar negeri.
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**b) Seksi Perlindungan Konsumen, bertugas untuk:**

1. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi terhadap perlindungan konsumen.
2. Melakukan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai konsumen.
3. Mendorong tumbuhnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
4. Memfasilitasi terbentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen.
5. Melaksanakan penetapan kemetrolagian dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus.
6. Melaksanakan tugas koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen lainnya.
7. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen.
8. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen.

9. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.

10. Koordinasi sosialisasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.

11. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.

12. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan dalam bahasa indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.

13. Memberikan pertimbangan teknis bidang perlindungan konsumen.

14. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas perlindungan konsumen.

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) **Seksi Pembinaan Perdagangan dan Pemasaran, bertugas untuk:**

1. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi terhadap pembinaan dan pemasaran

2. Melaksanakan pendataan usaha perdagangan barang dan jasa.

3. Menyiapkan bahan pembinaan usaha dan sarana perdagangan.
4. Menyajikan informasi perkembangan lembaga dan sarana perdagangan, termasuk penyerapan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pemasaran produk unggulan daerah.
6. Menyajikan informasi harga dan peluang pasar.
7. Memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha dagang kecil dan menengah dengan pengusaha besar.
8. Mengupayakan sertifikasi mutu dan pendaftaran merk dagang dan hak paten sebagai jaminan kelangsungan pemasaran barang hasil produksi koperasi, usaha kecil dan menengah.
9. Memberikan pertimbangan teknis bidang perdagangan dan pemasaran.
10. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas pembinaan perdagangan dan pemasaran.
11. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang perdagangan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **b. Penjelasan Struktur Organisasi dan Eselonisasi Jabatan**

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten

Sidoarjo, terdiri dari:

1. Unsur pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan
3. Unsur Pelaksanaan, terdiri dari:
  - 1) Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi, terdiri dari :
    - a) Seksi Kelembagaan Koperasi
    - b) Seksi Bina Usaha Koperasi
    - c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan
  - 2) Bidang Fasilitas Pelayanan, terdiri dari:
    - a) Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam
    - b) Seksi Pembiayaan dan jasa Keuangan
  - 3) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
    - a) Seksi Industri Agro dan Kimia
    - b) Seksi Industri Logam, Mesin, dan Tekstil
    - c) Seksi Industri Aneka dan Elektronika
  - 4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
    - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
    - b) Seksi Perlindungan Konsumen

c) Seksi Pembinaan Perdagangan dan Pemasaran

5) Bidang Energi dan Sumber daya Mineral terdiri dari:

a) Seksi Energi

b) Seksi Sumber Daya Mineral

4. UPT Dinas, terdiri dari :

1) Kepala UPT Dinas

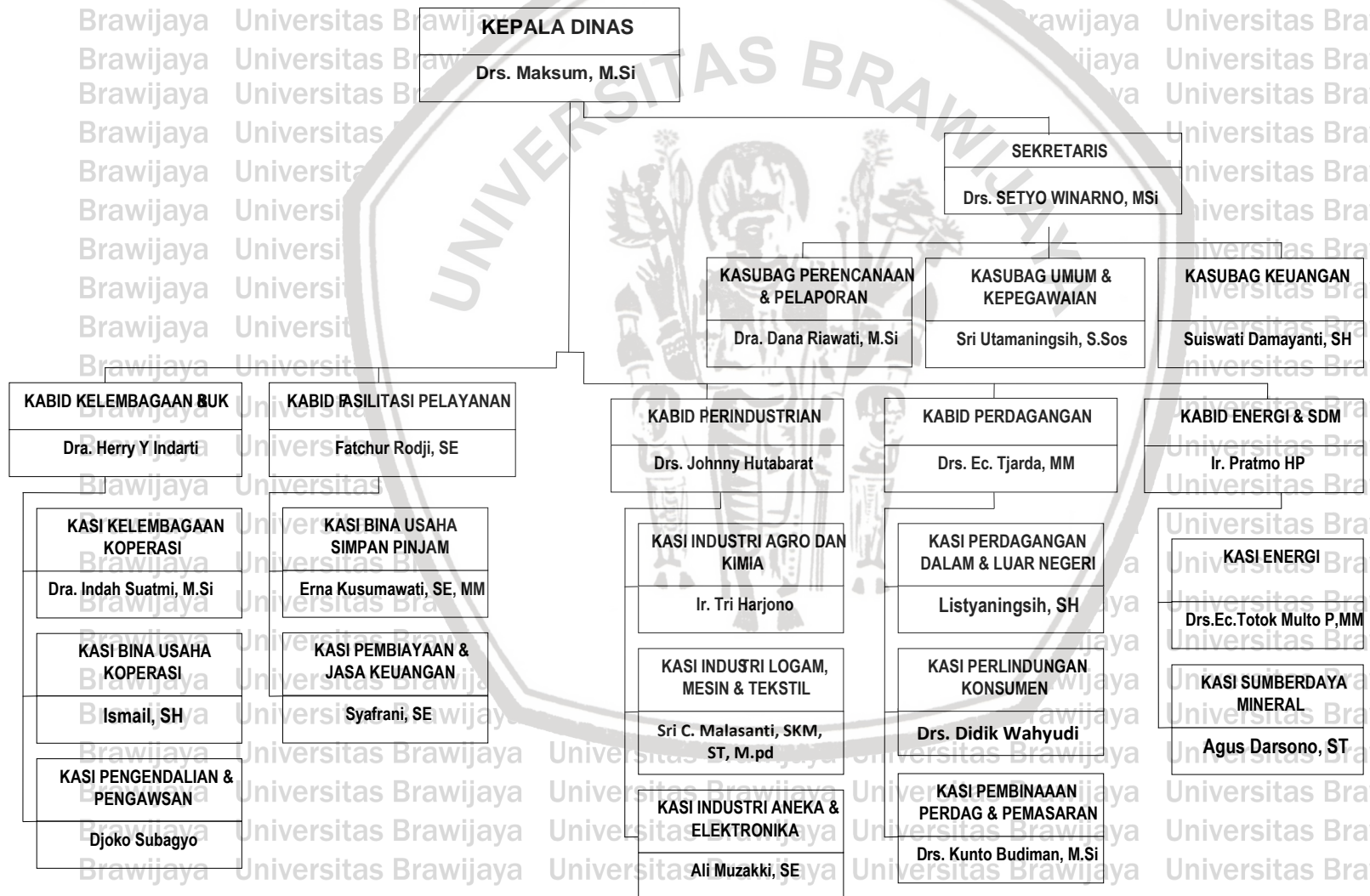
2) Sub Bagian Tata Usaha

3) Jabatan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar**  
**Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral**  
**Kabupaten Sidoarjo**



Gambar 4: Struktur Organisasi Diskoperindag  
 Sumber: Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo



c. **Visi, Misi, Tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sidoarjo**

1) **Visi**

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM mengambil peran serta dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan melalui ruang lingkup yang lebih sempit yaitu untuk masyarakat yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan dinas tersebut. Dengan demikian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM menetapkan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM yang Tangguh dan Mandiri Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat”

Tangguh yaitu mempunyai kemampuan, siap menghadapi persaingan dan perubahan serta dapat keluar dari tekanan yang menghimpitnya. Mandiri yaitu mempunyai kemampuan yang bersumber dari dalam dirinya sendiri tanpa menggantungkan pada kekuatan lain untuk mengembangkan eksistensinya.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM menetapkan misi sebagai berikut:

2) **Misi**

Dalam rangka mewujudkan Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM yang **Tangguh dan Mandiri**, maka misi yang ditetapkan oleh Diskoperindag dan ESDM antara lain:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pengelola Perindustrian, Perdagangan.

Misi 2: Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Perindustrian, Perdagangan.

Misi 3: Meningkatkan Kemampuan Usaha Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM.

### 3) Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai berkaitan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan sumber daya industri dalam usahanya.
2. Terpenuhinya barang dan jasa dalam jumlah dan harga yang terjangkau.
3. Meningkatnya pemasaran dan taraf hidup masyarakat industri dan perdagangan dari hasil usahanya.
4. Memberikan peluang usaha bagi industri kecil dan menengah.
5. Menciptakan wirausaha baru.
6. Meningkatnya akses permodalan bagi industri kecil dan dagang kecil.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha koperasi dan UKM.
8. Meningkatnya produktifitas daya saing dan pangsa pasar bagi Koperasi dan UKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha.
9. Meningkatnya akses permodalan bagi Koperasi dan UKM.

10. Meningkatnya citra Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, mandiri sebagai basis ekonomi kerakyatan.

#### **d. Sasaran**

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan terwujudnya manajemen industri dan perdagangan Sidoarjo secara berkelanjutan.
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan yang bertumpu pada potensi daerah.
3. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan kecil formal dan non formal sebagai alternatif pengembangan usaha.
4. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UKM.
5. Pengembangan bantuan kredit lunak bagi Koperasi dan UKM.
6. Pemberdayaan Koperasi dan UKM disegala sektor usaha ekonomi.

#### **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Pada tahap penyajian ini penulis akan memaparkan lalu kemudian mendiskripsikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran dan jawaban akhir dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini dibatasi oleh fokus penelitian yang telah ditetapkan mengenai implementasi strategi diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil di tanggulanggin dalam mengatasi bencana lumpur lapindo Fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

3. Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil tas dan koper Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo, yang di dalamnya meliputi:

**d. Peran Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil pasca bencana lumpur lapindo.**

Sidoarjo sebagai Kabupaten penyangga Surabaya, sebagai ibu kota Propinsi Jawa Timur, sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia, mempunyai peranan sangat penting, mengingat lokasi sangat dekat dengan Pelabuhan, bandara serta menjadi rute transportasi andalan Jawa Timur. Sidoarjo dengan jumlah penduduk sudah mencapai 1,8 juta jiwa dengan jumlah 15.000 Usaha Kecil dan Menengah dari berbagai jenis industry. Salah satu home industry yang memegang andil yang tidak sedikit, terlebih pada saat terjadi krisis meneter, industri kecil/ home industri masih dapat bertahan dan memberikan kontribusi pemasukan PAD Sidoarjo, seperti industri kecil tas dan koper Tanggulangin yang masih menjadi andalan Kabupaten Sidoarjo (Data Diskoperindag 2010).

Sesuai dengan Visi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo adalah : “Terwujudnya Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM yang Tangguh dan Mandiri Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat” serta misinya yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat Perindustrian, Perdagangan. Mendengar nama Kedensari, salah satu bayangan yang melintas dibenak siapa saja yang mendengar, besar kemungkinan terarah

pada industri kecil tas dan koper Tanggulangin. Dengan kerajinan berbahan utama kulit menjadi salah satu produk unggulan dan membutuhkan adanya sentuhan tahapan pemberdayaan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral agar dapat bersaing ke dalam industri besar.

Untuk datanya dapat dilihat pada Rencana Kerja Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 3: Rencana Kerja Tahun 2012  
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Hasil	Pagu	
			Rupiah	Sumber Dana
2012	Mengembangkan jaringan pemasaran produk secara efektif			
	1. Berkembangnya usaha perdagangan/ program peningkatan pasar	• Kegiatan pameran dan promosi produk-produk daerah	500.000.000	APBD
	2. Pembinaan desain produk industri tas dan koper	• Meningkatkan daya saing produk Daerah	30.000.000	APBD

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, 2012

Dari tabel di atas strategi pemberdayaan yang sudah dilakukan yaitu :

### 1) Pembinaan Desain Produk

Pembinaan desain produk merupakan bagian dari program Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengusaha industri tas dan koper dalam memproduksi model tas dan koper terbaru yang sesuai dengan perkembangan tren masa kini.

Pelaksanaan pemberdayaan industri kecil Tanggulangin yang dilakukan Diskoperindag ini memanggil narasumber dari ITS untuk memberikan pelatihan langsung kepada para pengusaha industri kecil tas dan koper. Pembinaan dan pelatihan desain produk yang diberikan kepada para pengusaha industri tas dan koper di upayakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan industri tas dan koper agar dapat berinovasi dalam pembuatan model trend tas dan koper masa kini serta dapat berkembang menjadi usaha yang lebih maju serta dapat bersaing di era globalisasi. Untuk kualitasnya industri tas dan koper Tanggulangin sudah bagus. Sebagaimana pendapat Bapak Drs. Jhony Hutabarat selaku Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Program utama karena penurunan omset ini adalah pembinaan desain produk dibidang industri. Pembinaan desain produk kita memberikan model-model terbaru. Disamping itu untuk emblem merknya langsung import dari China, sebab di Indonesia tidak ada.

Masalah produksi dan kualitasnya Industri kecil Tanggulangin sudah bagus". (wawancara pada 6 Agustus 2012 Pukul 09.00 WIB)



Gambar 5 : Pembinaan Desain Produk

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Pernyataan Drs. Jhony Hutabarat diperkuat oleh Bapak Ali Muzzakki, SE selaku Kepala Seksi Industri Aneka dan Elektronika mengemukakan:

"Iya mas, untuk pelatihan desain produk kami memanggil langsung dari ITS dan materi untuk tahun ini adalah trend tas di Tahun 2012". Kalau pelatihannya yang dari Sidoarjo sendiri cuma 6 kali dalam 1 Tahun, yang sering dari Pusat maupun provinsi". (wawancara pada 6 Agustus 2012 Pukul 11.00 WIB)

Dari pemahaman tersebut Diskoperindag mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan industri kecil tas dan koper Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo melalui program pembinaan desain produk sehingga produksi tas dan koper dapat mengikuti model tren tas saat ini yang diminati konsumen dipasaran.

## 2) Pembinaan Dalam Bidang Promosi

Pembinaan dalam bidang promosi merupakan program kedua dari Diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulangin pasca

bencana lumpur lapindo. Program ini gencar dilakukan Diskoperindag melalui kegiatan promosi, yang mana nantinya kegiatan tersebut dapat memulihkan kembali omset penjualan pengusaha industri kecil tas dan koper/ Tanggulangin. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo, Ibu Listyaningsih, SH sebagai berikut:

“Iya Mas, pasca bencana lumpur kita memang gencar melaksanakan promosi baik di Sidoarjo maupun diluar sidoarjo, kemarin kita membawa INTAKO ke Hongkong untuk mempromosikan produk kulit Tas dan koper. Tiap tahun kita rutin mngikuti event PRJ di jakarta, produk kita laku keras disana. Terus kita kemarin juga melaksanakan pameran di Surabaya”. *(wawancara pada 6 Agustus 2012 Pukul 11.00 WIB )*

Pernyataan Ibu Listyaningsih, SH diperkuat oleh Bapak Roni selaku pengusaha industri tas dan koper Tanggulangin mengemukakan:

“Kegiatan promosi gencar dilakukan oleh Diskoperindag. Hampir setiap bulan ada pameran. Produk kulit khususnya tas dan koper selalu habis kalau dibawa ke pameran di berbagai daerah. Sebab produk kami secara kualitasnya bagus”. *(wawancara pada 9 Agustus 2012 Pukul 18.30 WIB )*



Gambar 6 : Kegiatan Pameran

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

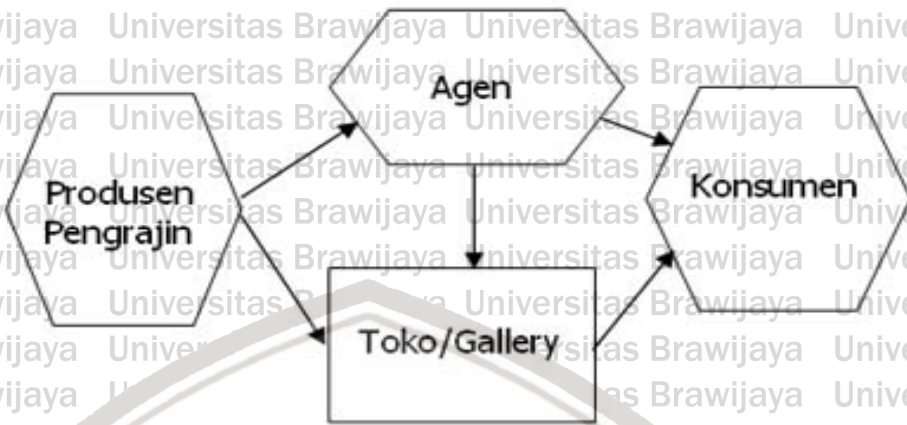


Pemasaran produk kulit di Tanggulangin umumnya dibedakan dalam dua bentuk. Pertama adalah penjualan langsung, baik melalui toko-toko, counter di Tanggulangin ataupun melalui agen-agen dari pengusaha yang bersangkutan. Kedua adalah melalui pesanan. Untuk penjualan langsung ternyata kurang memberikan keuntungan karena tidak cepat laku. Omzet terbesar di dapat dari pesanan.

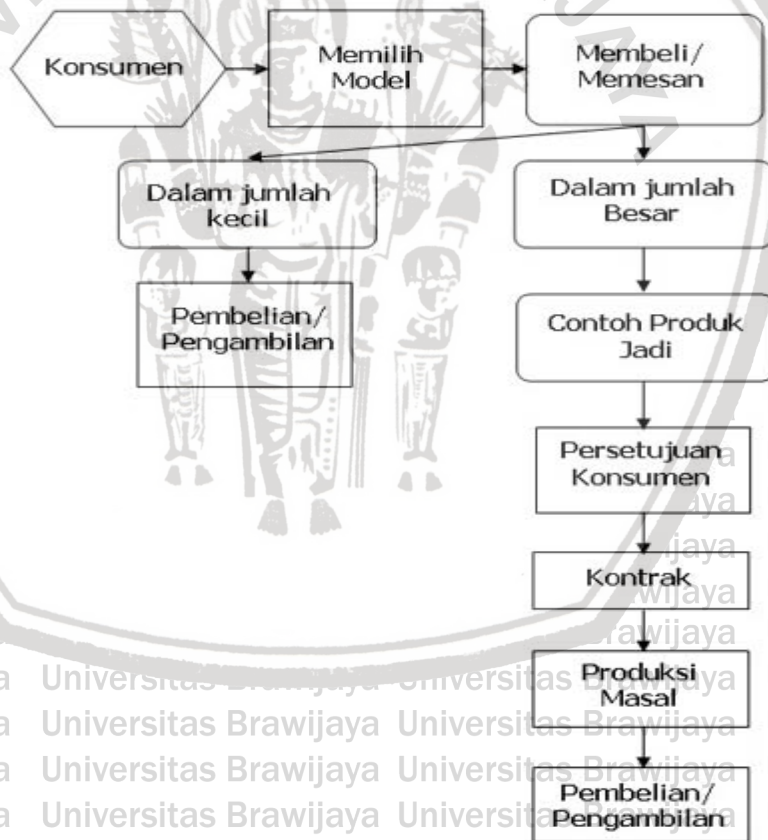
Proses pemasaran dimulai dari pilihan konsumen. Konsumen yang dalam hal ini adalah pemesan memilih salah satu desain produk atau juga bisa juga memiliki desainnya sendiri kemudian memesan produk pada pengrajin. Jika pesanan dalam jumlah besar, maka pengrajin akan membuat model terlebih dahulu dan kemudian diberikan kepada pemesan untuk melihat hasil tersebut. Jika pemesan cocok, maka akan dibuat kontrak untuk menyelesaikan seluruh pesanan.

Dalam memilih merk, pemesan juga bisa memilih untuk menggunakan merk dari pengrajin (beberapa pengrajin memiliki merk sendiri dan telah dipatenkan), tanpa merk, atau juga bisa menggunakan merk si pemesan sendiri. Produk yang telah selesai bisa diambil pemesan atau juga bisa diantarkan oleh pihak pengrajin. Ongkos kirim bisa ditanggung pemesan, atau dibebankan pada harga pokok produksi.

Gambar berikut ini menunjukkan proses pemasaran produk dari produsen (pengrajin) sampai ke tangan konsumen.



Gambar 7: Proses pemasaran produk dari produsen (pengrajin) sampai ke tangan konsumen.



Gambar 8: Proses konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan. (Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2010)

Dari pemahaman tersebut pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag memang serius dilakukan kepada para pengusaha dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan dari rencana strategi Diskoperindag.

**e. Perkembangan tingkat pendapatan pengusaha melalui kegiatan pemberdayaan industri kecil tas dan koper dilihat dari segi produksi**

Dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag melalui dua program pembinaan desain produk dan pembinaan dalam bidang produksi sesuai dengan salah satu tujuan dari rencana strategi yaitu meningkatnya pendapat dan taraf hidup pengusaha, pemberdayaan tersebut memperoleh hasil yang positif bagi pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin khususnya terhadap peningkatan pendapatan mereka pasca bencana lumpur lapindo. Sebagaimana pendapat Bapak Drs. Jhony Hutabarat selaku Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Hasil yang kita harapkan adalah peningkatan penghasilan para pengrajin dari penjualan retail. Jangka panjangnya setelah kita promosi ada kontak dagang antara pengrajin Industri tas dan koper tanggulangin dengan para pengusaha tempat kita promosi”. Kenaikan 20% terhadap para pengrajin industri tas dan koper Tanggulangin”.  
(wawancara pada 6 Agustus 2012 Pukul 09.00 WIB )

Pemberdayaan industri kecil Tanggulangin melalui program pembinaan desain produk dan pembinaan dalam bidang promosi memperoleh hasil yang baik. Dapat dilihat bahwa kenaikan pendapatan para pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin naik hingga

20%. Begitu pula para pengusaha industri tas dan koper Tanggulangin juga mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan setelah dilakukan pemberdayaan oleh Diskoperindag, seperti yang dikemukakan

Bapak M. Choiri selaku pengusaha industri tas dan koper Tanggulangin berikut:

“Secara langsung ada peningkatan dari adanya kegiatan promosi melalui pameran-pameran di berbagai daerah yang dilakukan Diskoperindag. Peningkatan pendapatan kami 2 kali lebih banyak dari hasil penjualan di showroom. Yang biasanya 2 juta/hari bisa mencapai 4 juta/hari”. (wawancara pada 8 Agustus 2012 Pukul 15.30 WIB)

Peneliti melakukan wawancara lanjutan untuk memperkuat data wawancara dengan Ibu Hj. Leli selaku pengusaha industri Tas dan Koper Tanggulangin sebagai berikut:

“Peningkatan sangat signifikan, dahulu setelah terjadi bencana lumpur kami hanya mendapat keuntungan 20 juta/Bulan dan setelah dilakukan pembinaan melalui pameran oleh Diskoperindag sekarang pendapatan kami mencapai 50 juta/Bulan”. (wawancara pada 9 Agustus 2012 Pukul 10.00 WIB)

Dengan demikian ada perkembangan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan/ peningkatan produksi pengusaha industri kecil tas dan koper sebesar 20% setelah adanya implementasi program Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil pasca bencana lumpur lapindo.

**f. Tingk at kepuasan konsumen dari pemakaian produk dilihat dari segi kualitasnya**

Sesuai dengan salah satu tujuan rencana strategis Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin pasca bencana lumpur lapindo yaitu terlindunginya konsumen dari pemakaian produk dan sasarannya untuk meningkatkan perlindungan konsumen, pihak Diskoperindag maupun pengusaha industri kecil sangat memperhatikan produksinya untuk memperoleh kualitas yang terbaik.

Program pemberdayaan desain produk sangat membantu dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Begitu pula para pengusaha dalam proses produksi sangat memperhatikan kualitasnya agar tidak menimbulkan keluhan dari konsumen. Sebagaimana beberapa alasan konsumen tetap menggunakan produk dari industri tas dan koper Tanggulangin berikut:

a. Ibu Ani, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB)

“Produk kerajinan tas Tanggulangin kualitasnya bagus”.

b. Ibu Grace, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.05 WIB)

“Harganya terjangkau serta modelnya menarik/ update”.

c. Ibu Lusi, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.15 WIB )

“Akses untuk menuju showroom dekat dengan rumah dan harga terjangkau”.

d. Bapak Fatkhur, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.30 WIB )

“Kualitas kulitnya bagus dan jahitannya sangat rapi”.

e. Bapak Kuswan, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.35 WIB )

“Harganya tidak begitu mahal, tetapi kualitasnya bagus”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dari 5

konsumen yang mengaku memberi penilaian terhadap produk industri tas

dan koper Tanggulangin, 3 orang dengan jawaban kualitas produk tas dan

kopernya bagus dan 2 orang mengaku harga produk tas dan koper

Tanggulangin terjangkau.

Ekspektasi konsumen terhadap industri kecil di Tanggulangin dari

5 konsumen jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan akses jalan

menuju showroom sebaiknya diperlebar, kualitas dan produknya harus

dipertahankan dan sering-sering diadakan diskon pada moment tertentu.

Sebagaimana yang dikemukakan para konsumen berikut:

a. Ibu Ani, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“Akses jalan menuju showroom sebaiknya diperlebar”.

b. Ibu Grace, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.05 WIB )

“Dipertahankan dan makin dikembangkan lagi produknya.”

c. Ibu Lusi, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.15 WIB )

“Sering-sering diadakan diskon untuk produk tas dan koper di

moment tertentu”.

d. Bapak Fatkhur, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.30 WIB )

“Sebaiknya desediakan lahan parkir yang luas”.

e. Bapak Kuswan, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.35 WIB )

“Kualitasnya harus dipertahankan”.

Memang masukan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan industri kecil Tanggulangin dalam meningkatkan pendapatan maupun kualitas dari tas dan koper yang diproduksi.

4. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi rencana strategis diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil tanggulangin khususnya pada industri tas dan koper, yang di dalamnya meliputi:

c. Faktor internal dari implementasi rencana strategis

1) Faktor pendukung

- Untuk pelaksanaan pemberdayaan industri kecil terdapat di rencana kerja (renja) 2012.
- Dana APBD sebesar Rp. 500.000.000,- untuk program peningkatan pasar dan Rp. 30.000.000,- untuk pembinaan desain produk.
- Pemerintah yang pro aktif dalam pemberdayaan industri kecil.
- Bantuan berupa mesin jahit kepada pengusaha industri kecil.
- Visi dan Misi Diskoperindag Sidoarjo

4) Penghambat

- Kurangnya frekuensi pelatihan desain produk kepada pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin.
- Banyak pekerja industri kecil Tanggulangin yang keluar dan beralih kepekerjaan lain.

Mahalnya bahan baku.

d. Faktor eksternal dari implementasi rencana strategis

1) Pendukung

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adanya partisipasi pengusaha industri kecil Tanggulangin.

Visi dan Misi kabupaten Sidoarjo.

2) Penghambat

Mainset pengusahanya (untuk pengrajin yang kecil pokoknya mendapatkan order) serta jalan yang terlalu sempit, sebagaimana pendapat Bapak Jhonny Hutabarat selaku kepala bidang perindustrian kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

“Faktor internalnya yaitu mainset pengusahanya ( untuk pengrajin yang kecil pokoknya mendapat order) tetapi kalau yang sudah menengah tidak hanya mendapatkan order saja tetapi mereka dapat kreatif dan mengembangkan produknya sendiri. Kalau faktor internalnya yaitu jalan yang terlalu sempit yang bisa menghambat proses untuk menuju lokasi”. ( wawancara pada 6 Agustus 2012 Pukul 09.00 WIB )

UKM yang masih manja dalam mengikuti berbagai kegiatan promosi, sebagaimana pendapat Ibu Ibu listyaningsih selaku Kepala Seksi Perdagangan dan Luar Negeri kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

“Faktor penghambatnya yaitu terkadang UKM kita kan masih manja dan ada juga yang sudah siap mengikuti. Untuk transport bagi ukm yang sudah besar ditanggung sendiri, ukm yang kecil minta kita fasilitasi baik stand maupun akomodasinya”. (wawancara pada 6 Agustus 2012 Pukul 11.00 WIB )



### C. Pembahasan

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan pada penyajian data bahwa program ini melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat. Yang intinya saling membantu pelaksanaan implementasi rencana strategis Diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulangin dalam mengatasi bencana lumpur lapindo. Dengan adanya implementasi rencana strategis melalui program pemberdayaan diharapkan terjadi peningkatan. Mengingat pengertian pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat yang dalam kondisi ketidak berdayaan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian (Jurnal Administrasi Publik, 2004, h.60).

Dalam setiap pelaksanaan program tidak akan berjalan dengan mulus, pasti mengalami kendala dan hambatan. Tetapi di sisi lain juga terdapat faktor pendorongnya yang dapat mensukseskan pelaksanaan program. Sehingga diperlukan langkah untuk mengeliminir hambatan dan perlu memikirkan langkah lagi untuk memudahkan pelaksanaan program.

Dari data-data yang ada pada penyajian data analisa untuk meneliminir permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Agar nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran yang dapat memperbaiki pelaksanaan program. Untuk itu pada pembahasan berikut adalah analisis data-data yang ada.

## **1. Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin dalam mengatasi bencana lumpur lapindo.**

### **a. Peran Diskoperindag Dalam Mengatasi Bencana Lumpur Lapindo.**

Industri kecil menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi karena kontribusinya yang besar dalam perekonomian riil. Industri kecil menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan bisnisnya. Antara lain kurangpengetahuan pengolahan usaha dan lemah dibidang pemasaran. Selain itu, kondisi pasar yang dihadapi industri kecil adalah situasi pasar yang monopolistik juga merupakan masalah tersendiri sehingga industri kecil sulit berkembang. Peranan industri kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam pemberdayaan yang dikelola Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Sesuai dengan Visi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo adalah :  
“Terwujudnya Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM yang Tangguh dan Mandiri Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat” serta misinya yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat Perindustrian, Perdagangan.

Mendengar nama Kedensari, salah satu bayangan yang melintas dibenak siapa saja yang mendengar, besar kemungkinan terarah pada industri kecil tas dan koper Tanggulangin. Dengan kerajinan berbahan utama kulit menjadi salah satu produk unggulan dan membutuhkan adanya sentuhan tahapan

pemberdayaan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral agar dapat bersaing ke dalam industri besar.

Keberadaan industri kecil tas dan koper secara nyata dapat menyangga perekonomian banyak elemen masyarakat. Oleh karenanya Diskoperindag berusaha semakin meningkatkan pendapatan pengusaha dengan menerapkan strategi pemberdayaan terlebih munculnya bencana lumpur lapindo yang mengakibatkan turunnya omset.

Sebagaimana strategi oleh *McNichols* dalam Salusu (1996, h.101) bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi yang sudah dilakukan yaitu :

### **1) Pembinaan Desain produk**

Pembinaan dan pelatihan desain produk yang diberikan kepada para pengusaha industri tas dan koper di upayakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan industri tas dan koper agar dapat berinovasi dalam pembuatan model trend tas dan koper masa kini serta dapat berkembang menjadi usaha yang lebih maju serta dapat bersaing di era globalisasi. Dalam pelatihan ini tidak diikuti oleh semua pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin. Hanya beberapa perwakilan saja yang berminat dalam kegiatan ini. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara

individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sitem lain diluar dirinya. Seperti yang dijelaskan oleh Personal *et.al.* dalam Suharto (2005:66) menyatakan bahwa pada umumnya proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua interfensi pekerjaan social dapat dilakukan malalui kolektifitas. Hal tersebut dilakukan agar dapat kembali menarik para konsumen untuk berbelanja lagi disentra industri tas dan koper Tanggulangin. Dengan adanya model terbaru tentunya konsumen merasa puas atas barang yang dibelinya.

Pelaksanaan pembinaan dalam desain produk pihak Diskoperindag memanggil narasumber dari ITS untuk memberikan pelatihan langsung kepada para pengusaha industri kecil tas dan koper.

Sebagaimana yang dikutip oleh Riyadi-Brtakusumah (2004, h.279), dikemukakan bahwa “Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dan atau mungkin timbul”.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan pelaksanaan pembinaan desain produk kurang mendapat perhatian dari Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terbukti dari pembinaan terhadap pengusaha industri kecil tas dan koper cuma terjadi pada waktu itu dan itu pun tidak secara berkelanjutan. Sekarang hanya kadang-kadang pihak Diskoperindag

melakukan pembinaan desain produk 3 bulan sekali dan itu pun tidak rutin.

## 2) **Pembinaan Dalam Bidang Promosi**

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, suatu industri harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal memasarkan produknya. Menurut Irsan Azhary Saleh (1986:5) menyatakan bahwa industri kecil juga memberi peranan yang sangat berarti dalam pembangunan perekonomian. Pertama : industri kecil dapat menciptakan peluang berusaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah. Setelah terkena dampak isu dari bencana lumpur lapindo sentra industri kecil tas dan koper ini mengalami penurunan omset.

Menimbang akan industri kecil dapat menciptakan peluang berusaha yang luas pembinaan bidang promosi selalu gencar dilakukan oleh Diskoperindag dengan tujuan meningkatkan kembali omset pengusaha industri kecil. Dalam pembinaan promosi ini peserta berasal dari perwakilan para pengusaha industri kecil Tanggulangin yang berminat untuk mengikuti pameran yang diadakan Diskoperindag. Beberapa kegiatan pameran yang diikuti di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan temuan di lapangan pemasaran produk kulit di Tanggulangin umumnya dibedakan dalam dua bentuk. Pertama adalah penjualan langsung, baik melalui toko-toko, konter di Tanggulangin ataupun melalui agen-agen dari pengusaha yang bersangkutan. Kedua adalah melalui pesanan. Untuk penjualan langsung ternyata kurang

memberikan keuntungan karena tidak cepat laku. Omzet terbesar di dapat dari pesanan.

Proses pemasaran dimulai dari pilihan konsumen. Konsumen yang dalam hal ini adalah pemesan memilih salah satu desain produk atau juga bisa juga memiliki desainnya sendiri kemudian memesan produk pada pengrajin. Jika pesanan dalam jumlah besar, maka pengrajin akan membuat model terlebih dahulu dan kemudian diberikan kepada pemesan untuk melihat hasil tersebut. Jika pemesan cocok, maka akan dibuat kontrak untuk menyelesaikan seluruh pesanan.

Menurut Udoji dalam Wahab (2005:59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dalam memilih merk, pemesan juga bisa memilih untuk menggunakan merk dari pengrajin (beberapa pengrajin memiliki merk sendiri dan telah dipatenkan), tanpa merk, atau juga bisa menggunakan merk si pemesan sendiri. Produk yang telah selesai bisa diambil pemesan atau juga bisa diantarkan oleh pihak pengrajin. Ongkos kirim bisa ditanggung pemesan, atau dibebankan pada harga pokok produksi. Misi dagang juga dilakukan dengan membawa produk ke berbagai daerah serta melakukan sharing dengan para pengusaha lain terhadap produk unggulan industri tas dan koper Tanggulangin.

Sebagaimana menurut Kertasasmitha (1996:74) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dengan penyediaan input (masukan) serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan. Jadi dengan adanya program pembinaan pemasaran terhadap pengusaha industri kecil dapat membuka akses keberbagai peluang dalam pemasaran produknya.

**b. Perkembangan Tingkat Pendapatan Pengusaha Melalui Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil Tas dan Koper dilihat Dari Segi Produksi**

Pembangunan masyarakat selalu diupayakan dapat memandirikan masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang dapat mewujudkan harapannya dan mengaktualisasikan kemampuan diri dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Konsep utama pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia. Karena itu, pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberikan peran pada masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Pembangunan ekonomi memegang peranan penting dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Secara konseptual sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi.

Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan Gross national Product (GNP) yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro 2004: 21).

Peningkatan pendapatan pengusaha industri kecil Tanggulangin dilihat dari capaian sasaran program pemberdayaan. Berdasarkan target dari rencana strategis tahun 2011-2015 Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo. Peneliti tidak mendapatkan kesimpulan utuh tentang capaian yang didapatkan oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo terkait peningkatan pendapatan, karena renstra berlaku sampai dengan 2015 dan baru bisa diambil kesimpulan secara utuh pada tahun 2015. Namun dari kurun waktu 2011-2012 terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan pada angka 20%.

Sebagaimana menurut Riyadi Bratakusumah (2004, h.308), salah satu manfaat umum perencanaan strategis yaitu senantiasa mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis.

Berdasarkan temuan dilapangan pemberdayaan industri kecil Tanggulangin melalui program pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag memperoleh hasil yang baik. Dapat dilihat bahwa kenaikan pendapatan para pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin naik hingga 20%. Para



pengusaha mengaku dulu penghasilan perbulan hanya 20 juta perbulan setelah adanya pemberdayaan bisa mencapai 40 juta perbulan. Yang paling banyak menyumbang pada penghasilan para pengusaha ialah kegiatan pameran yang gencar dilakukan di dalam maupun luar negeri. Dibukanya arteri tol porong juga sedikit berpengaruh terhadap penghasilan pengusaha. Hal ini sesuai dengan Misi Diskoperindag yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat Perindustrian, Perdagangan.

### **c. Tingkat Kepuasan Konsumen Dari Pemakaian Produk Dilihat Dari Segi Kualitasnya**

Evaluasi terhadap suatu produk dapat dilihat dari kepuasan konsumen dalam pemakaian produk tersebut, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam datang dan membeli kembali produk yang dijual dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti : Sistem keluhan dan saran, pameran, survei kepuasan pelanggan. Hal tersebut juga berguna untuk membangun sebuah loyalitas sebaiknya terlebih dahulu menumbuhkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jika pelanggan sudah puas dan loyal maka ia akan menjadi iklan hidup, dimana perusahaan tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk mengiklankan kinerja produknya. Sehingga pelanggan dapat mempercayakan kualitas suatu produk yang dipasarkan.

Industri tas dan koper ditanggulangi pengerajin menerapkan 2 (dua) indikator yang digunakan dalam kajian terhadap kepuasan pelanggan yang diberikan oleh pengerajin industri dimana responden merupakan pembeli

dari produk-produk di Tanggunggalin yaitu : alasan konsumen dan ekspektasi konsumen berdasarkan kepuasan konsumen dari pemakaian produk dilihat dari segi kualitasnya.

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja dan pelengkap inovatif yang terbaik.

Manajer dalam organisasi berorientasi produk memusatkan perhatian mereka pada usaha untuk menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakannya.

Sebagaimana menurut Riyadi Bratakusumah (2004, h.308), manfaat umum perencanaan strategis yaitu :

9. Sebagai alat bagi pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk membangun arah tujuan organisasi dalam jangka panjang.
10. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja.
11. Menciptakan rasa tanggung jawab dan mendorong komitmen dari seluruh anggota organisasi pada semua tingkatan.
12. Senantiasa mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis.
13. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama.
14. Mengembangkan sifat fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi organisasi.
15. Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis baik kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan aktivitas organisasi (pelayanan).
16. Membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga akan mendorong sifat proaktif dalam bergerak.

Harga menjadi faktor utama dalam menentukan pembelian suatu produk. Disini kita bisa menganalisis bahwa konsumen Indonesia cenderung lebih mementingkan hasil produk atau output dari suatu proses tanpa

memperhatikan pembuatan produk tersebut selama dalam proses produksi sehingga menimbulkan persepsi yang salah terhadap mutu tersebut.

Diskoperindang dalam rencana strategi pengembangan industri kecil Sidoarjo 2009, menetapkan tujuan dan sasaran memberdayakan usaha kecil khususnya pada industri tas dan koper Tanggulangin. Yang salah satu tujuannya yaitu terlindunginya konsumen dari pemakaian produk. Oleh karena itu pengusaha industri tas dan koper Tanggulangin sangat mengutamakan kualitasnya agar konsumen merasa nyaman menggunakan produknya.

Berdasarkan temuan di lapangan hasil wawancara yang telah dilakukan, dari 5 konsumen yang mengaku memberi penilaian terhadap produk industri tas dan koper Tanggulangin, 3 orang dengan jawaban kualitas produk tas dan kopernya bagus dan 2 orang mengaku harga produk tas dan koper Tanggulangin terjangkau. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya ekpekstasi konsumen untuk membeli produk tas dan koper dari industri kecil Tanggulangin masih tinggi.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi rencana strategis diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil tanggulangin khususnya pada industri tas dan koper, yang di dalamnya meliputi:**

### **a. Faktor Internal Dari Implementasi Rencana Strategis**

### 1) Faktor Pendukung

- Adanya Rencana Strategis dan Rencana Kerja bagi SKPD yang terkait dengan pemberdayaan industri kecil.

Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah disusun oleh

Diskoperindag merupakan kumpulan suatu program yang

bermaksud untuk memberdayakan industri kecil melalui berbagai

cara yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari tenaga kerja

aparaturnya yang siap dan profesional serta didukung dengan

pengusaha industri kecil tas dan koper yang terlibat dalam

pemberdayaan dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan

sebelumnya.

- Untuk pelaksanaan Pembinaan Desain Produk dan Pembinaan Promosi terdapat di Rencana Kerja (Renja) 2012.

Untuk pelaksanaan Pembinaan Desain Produk dan Pembinaan

Promosi ini diperkuat dengan Rencana Kerja tahun 2012 yang

telah dibuat oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo. Dari Rencana

Kerja tersebut dapat dilihat bahwa adanya suatu program/

kegiatan yang mengarah pada meningkatnya daya saing produk

daerah melalui pengembangan, sosialisasi, serta promosi. Dana

APBD sebesar Rp. 500.000.000,- untuk program peningkatan

pasar dan Rp. 30.000.000,- untuk pembinaan desain produk.

- Pemerintah yang pro aktif dalam pemberdayaan industri kecil.

Pemerintah yang pro aktif dalam memicu peningkatan pendapatan pengusaha industri kecil. Begitu pula terdapat pendukung eksternalnya yaitu para pengusaha tas dan koper dan narasumber dari ITS.

- Bantuan berupa mesin jahit kepada pengusaha industri kecil.

Bantuan ini sangat mendukung kelancaran produksi bagi para pengusaha industri tas dan koper untuk lebih maksimal lagi dalam proses pengerjaan produknya.

- Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sidoarjo.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM yang merupakan salah satu pelaku dalam pemberdayaan industri kecil tas dan koper menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM yang Tangguh dan Mandiri Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat” dengan dukungan Misi sebagai berikut:

b. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pengelola Perindustrian, Perdagangan.

d. Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Perindustrian, Perdagangan.

e. Meningkatkan Kemampuan Usaha Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

## 2) Faktor Penghambat

— Kurangnya frekuensi pelatihan desain produk kepada pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin.

Kurangnya frekuensi pelatihan secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat penguasaan dalam hal pembuatan desain-desain terbaru yang akan diaplikasikan pada produk yang akan diproduksi oleh para pengusaha industri kecil Tanggulangin.

— Banyak pekerja industri kecil Tanggulangin yang keluar dan beralih kepekerjaan lain.

Banyaknya pekerja yang beralih kebidang pekerjaan lain tentunya sangat disayangkan oleh para pengusaha industri tas dan koper.

Dengan bertambah sedikitnya para pegawai proses produksi akan lambat dalam pengerjaannya.

## b. Faktor Eksternal Dari Implementasi Rencana Strategis

### 1) Faktor Pendukung

— Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah juga turut berperan aktif dalam pemberdayaan industri kecil di Indonesia antar lain dengan membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut semakin mendukung untuk lebih mengembangkan

usahanya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- Adanya partisipasi pengusaha industri kecil Tanggulangin.

Partisipasi pengusaha industri kecil dalam rangka mensejahterahkan kembali usahanya sangatlah besar karena mereka mengetahui pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag sangat berpengaruh terhadap usahanya. Dan mereka berfikir apabila produknya diminati banyak konsumen seperti saat sebelum adanya bencana lumpur lapindo maka akan mengangakat tingkat perekonomian mereka.

- Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumber daya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo, maka visi Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai berikut:

### 3) *Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:*

"Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan"

### 2) *Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:*

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2010 - 2015 tersebut, ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo, "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" dijabarkan ke dalam delapan misi

utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri.

## 2) Faktor Penghambat

- Mainset pengusahanya (untuk pengrajin yang kecil pokoknya mendapatkan order) serta jalan yang terlalu sempit.

Faktor internalnya yaitu mainset pengusahanya ( untuk pengrajin yang kecil pokoknya mendapat order) tetapi kalau yang sudah menengah tidak hanya mendapatkan order saja tetapi mereka dapat kreatif dan mengembangkan produknya sendiri. Kalau faktor internalnya yaitu jalan yang terlalu sempit yang bisa menghambat proses untuk menuju lokasi.

- UKM yang masih manja dalam mengikuti berbagai kegiatan promosi.

Faktor penghambatnya yaitu terkadang UKM kita kan masih manja dan ada juga yang sudah siap mengikuti. Untuk transportasinya bagi ukm yang sudah besar ditanggung sendiri, ukm yang kecil minta difasilitasi baik stand maupun akomodasinya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama ini dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian baik wawancara, dokumentasi, maupun observasi yang kemudian akan dibahas oleh penulis tentang “Implementasi Rencana Strategis Diskoperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangin Pasca Bencana Lumpur Lapindo”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

1. Pembinaan desain produk merupakan program Diskoperindag untuk memberikan suatu penyuluhan terhadap para pengusaha industri kecil tas dan koper mengenai tren tas masa kini dengan membawa narasumber langsung dari ITS. Dengan demikian maka implementasi strategi pemberdayaan industri kecil dapat dikatakan berhasil sebab menambah wawasan dan inovasi para pengusaha industri tas dan koper dalam berproduksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kembali kesejahteraan pengusaha.
2. Pembinaan dalam bidang promosi gencar dilakukan Diskoperindag diberbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri yang melibatkan para pengusaha tas dan koper. Dengan pembinaan tersebut pengusaha industri tas dan koper Tanggulangin lebih luas lagi dalam membuka akses keberbagai peluang dalam pemasaran produknya.

3. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, untuk pemberdayaan industri kecil pasca bencana lumpur lapindo yang berakibat turunnya omset dari tahun ke tahun mengalami peningkatan lagi dilihat dari segi produksi maupun pendapatan para pengusaha industri kecil tas dan koper.

4. Dilihat dari kepuasan konsumen terhadap pemakaian produk, konsumen merasa puas dengan kualitas produk tas dan kopernya. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pengusaha industri kecil mengutamakan kualitas dalam produknya dan terus menyempurnakannya.

5. Proses implementasi rencana strategi Diskoperindag dalam memberdayakan industri kecil Tanggulangin ada faktor yang menjadi pendukung pelaksanaannya seperti Dana APBD sebesar Rp. 500.000.000,- untuk program peningkatan pasar dan Rp. 30.000.000,- untuk pembinaan desain produk dan ada faktor yang menghambat seperti kurangnya frekuensi pelatihan desain produk.

6. Secara keseluruhan implementasi Rencana Strategis berdasarkan Program Pemberdayaan Industri Kecil berjalan dengan baik dengan hasil yang dikatakan baik pula walau ada sisi kekurangan yang masih ada. Segala bentuk perhatian pemerintah melalui kegiatan pemberdayaan nampaknya membuahkan hasil positif di mata para pengusaha. Di mana kegiatan tersebut dapat kembali memulihkan perkonomiannya yang sempat terpuruk akibat dampak isu bencana lumpur lapindo.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat bermanfaat untuk pemberdayaan industri kecil Tanggulangin adalah sebagai berikut :

1. Diskoperindag harus lebih banyak lagi memberikan inovasi model tren tas dan koper masa kini kepada pengusaha industri kecil dengan terus mendatangkan berbagai narasumber yang ahli dalam desain produk.
2. Dalam proses pemasaran, Diskoperindag harus lebih banyak lagi membuka peluang pasar melalui promosi ke berbagai daerah maupun luar negeri. Sebab promosi ini banyak memberikan dampak positif terhadap penghasilan pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin.
3. Diskoperindag perlu mengadakan pengawasan terhadap proses produksi agar kualitas industri tas dan koper Tanggulangin tetap baik dan konsumen merasa nyaman untuk memakai produknya.
4. Diskoperindag harus memperhatikan apa yang menjadikan hambatan dalam proses implementasi strategi pemberdayaan, agar dapat memperlancar proses pembinaan terhadap pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin.
5. Meskipun implementasi strategi pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag dapat dikatakan berhasil karena dapat mensejahterahkan kembali pengusaha industri kecil pasca bencana lumpur lapindo, sebaiknya pembinaan terus dilakukan agar pengusaha terus mengembangkan produknya.

6. Perlu adanya kordinasi antar pengusaha industri kecil dan Diskoperindag agar penjualan produknya bisa merata, dalam artian para pembeli bisa menjamah seluruh toko/galeri yang ada di kawasan industri kecil tas dan koper Tanggulangin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Ed. 2, Cet. 5*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto & Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang. 2011, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Danim, Sudarwan, 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan Ed. 1, Cet. 3*. Bumi Aksara: Jakarta
- Daryanto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo: Surabaya
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta
- Dunn, William N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah Cet. 10*. PT. Hanindita Graha Widya: Yogyakarta
- Islamy, M Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Milles dan Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Muluk, M.R. Khairul, 2008. *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA UNIBRAW
- \_\_\_\_\_, Mustapadidjaya. 1980. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Parsons, Wayne, 2006. *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Genca

Saleh, Irzan Azhary. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. LP3ES: Jakarta

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Soekanto, Suryono. 2005. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya media

Suryono, Agus. 2004. *“Teori dan Isu Pembangunan”*. Malang: Penerbit UM Press.

Syaukani, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Thoha, Miftah, 1988. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Ed. 1 Cet. 3*. Jakarta: Rajawali

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.

Utomo, Warsito. 2005. *Administrasi Publik Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

### **Artikel dan Jurnal Internet :**

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *“Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah Buku I Rencana Induk Pengembangan Industri kecil 2002-2004”* Artikel diakses dari internet dengan alamat website: <http://www.google.com> pada hari Rabu, 4 Januari 2012 pkl. 10.00 WIB

Widakdo, Gatot, "*Bencana Lumpur Lapindo Rontoknya Industri Tanggulangin*" diakses dari internet dengan alamat website: <http://kompas.com/kompas-cetak/0611/28/ekonomi/3125091.htm> pada hari Rabu, 4 Januari 2012 pkl. 10.00 WIB

Artikel diakses dari internet dengan alamat website: <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-15845-3405100004-paperpdf.pdf> pada hari Rabu, 4 Januari 2012 pkl. 10.41 WIB

Artikel diakses dari internet dengan alamat website: <http://pustaka.net/peran-pemerintah-dalam-pemberdayaan-usaha-kecil-menengah-studi-kasus-sentra-industri-kerajinan-tas-koper-tanggulangin-kabupaten-sidoarjo.pdf.htm> pada hari Rabu, 4 Januari 2012 pkl. 10.28 WIB



## Pedoman Wawancara

### A. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sidoarjo

1. Bagaimana pandangan diskoperindag terhadap industri kecil di Tanggulangin setelah terjadi lumpur lapindo ?
2. Apa saja program diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil dalam mengatasi lumpur lapindo? Dan program apa yang sudah dilaksanakan ?
3. Berapa kali frekuensi pelatihan yang diberikan terhadap industri kecil tanggulangin ?
4. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan industri kecil Tanggulangin yang dilakukan Diskoperindag ?
5. Bagaimana hasil dari program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan Diskoperindag ?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulangin?

- Faktor Internal

- Faktor Eksternal



B. Untuk pengrajin industri kecil

1. Apa saja program diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil dalam mengatasi lumpur lapindo? Dan program apa yang sudah dilaksanakan ?

2. Berapa kali frekuensi pelatihan yang diberikan terhadap industri kecil tanggulagin ?

3. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan industri kecil Tanggulagin yang dilakukan Diskoperindag ?

4. Bagaimana hasil dari program pemberdayaaan yang sudah dilaksanakan Diskoperindag ?

5. Dalam sektor ekonomi apakah terjadi peningkatan setelah dilakukan pembinaan ?

6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulagin baik secara internal maupun eksternal ?

- Faktor Internal
- Faktor Eksternal

7. Bagaimana ekspektasi konsumen terhadap produk industri kecil di Tanggulagin ?

8. Bagaimana alasan konsumen masih tetap menggunakan produk industri kecil di Tanggulagin ?

- Bagaimana pandangan diskoperindag terhadap industri kecil di Tanggulangin setelah terjadi lumpur lapindo ?

a. Bapak Ali Muzzaki, 6 Agustus 2012 ( Pukul 09.00 WIB )

“Tanggulangin tumbuh dan berkembang tahun 1980an, usaha ini sangat meningkat pesat. Setelah ada lumpur lapindo itu mulai menurun. Ada beberapa yang sampai tutup. Dengan adanya pembukaan jalan baru secara otomatis para konsumen langsung menuju INTAKO”.

b. Ibu listyaningsih, 6 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“Setelah terjadi lumpur lapindo industri kecil Tanggulangin mengalami penurunan omzet. Karena adanya korban dari isu pemberitaan tenggelamnya TAS Tanggulangin. Padahal sebenarnya TAS itu sendiri adalah perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera. Dengan adanya penurunan omzet kami dari Diskoperindag melakukan beberapa program pemberdayaan agar industri kecil Tanggulangin dapat meningkat lagi hasil penjualannya”.

- Apa saja program diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil dalam mengatasi lumpur lapindo? Dan program apa yang sudah dilaksanakan ?

a. Bapak Ali Muzzaki, 6 Agustus 2012 ( Pukul 09.00 WIB )

“Program utama karena penurunan omset ini adalah promosi langsung, dan desain produk dibidang industri. Untuk promosi langsung melalui misi dagang ke daerah-daerah baik di Sidoarjo maupun luar Sidoarjo, dan untuk desain produk kita memberikan model-model terbaru. Disamping itu untuk emblem merknya langsung import dari China, sebab di Indonesia tidak ada. Masalah produksi dan kualitasnya Industri kecil Tanggulangin sudah bagus”.

b. Ibu listyaningsih, 6 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“Setelah bencana lumpur kita memang gencar melaksakan promosi baik di Sidoarjo maupun diluar sidoarjo, kemarin kita membawa INTAKO ke Hongkong untuk mempromosikan produk kulit Tas dan koper. Tiap tahun kita rutin mngikuti event PRJ di jakarta, produk kita laku keras disana. Terus kita kemarin juga melaksakan pameran di Surabaya”.

- Berapa kali frekuensi pelatihan yang diberikan terhadap industri kecil tanggulangin ?

a. Bapak Ali Muzzaki, 6 Agustus 2012 ( Pukul 09.00 WIB )

“ Kalau pelatihannya yang dari Sidoarjo sendiri cuma 6 kali dalam 1 Tahun, yang sering dari Pusat maupun provinsi. Bantuan mesin juga diberikan oleh pusat? ”

b. Ibu listyaningsih, 6 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“ setiap bulan 1 kali, jadi setahun kita melakukan promosi sebanyak 12 kali. Untuk yang di luar Negeri 1 Tahun 2 kali. ”

• Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan industri kecil Tanggulangin yang dilakukan Diskoperindag ?

a. Bapak Ali Muzzaki, 6 Agustus 2012 ( Pukul 09.00 WIB )

“ Tempo hari saya bertemu ketua INTAKO Tanggulangin katanya sudah meningkat sekitar 20%. Untuk pelatihan desain produk kami memanggil langsung dari ITS dan materi untuk tahun ini adalah trend tas di Tahun 2012 ”.

b. Ibu listyaningsih, 6 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“ Promosi kita lewat pameran, misi dagang dengan membawa produk. Kemarin kita ke Batam terus disana kita sharing. Untuk kontak dagang langsung dengan pengrajinnya. ”

• Bagaimana hasil dari program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan Diskoperindag ?

a. Bapak Ali Muzzaki, 6 Agustus 2012 ( Pukul 09.00 WIB )

“ Kenaikan 20% terhadap para pengrajin industri tas dan koper Tanggulangin dan bantuan merk ”.

b. Ibu listyaningsih, 6 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“ Hasil yang kita harapkan adalah peningkatan penghasilan para pengrajin dari penjualan retail. Jangka panjangnya setelah kita promosi ada kontak dagang antara pengrajin Industri tas dan koper tanggulangin dengan para pengusaha tempat kita promosi ”.

- Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulangin?

a. Bapak Ali Muzzaki, 6 Agustus 2012 ( Pukul 09.00 WIB )

“Faktor internalnya yaitu mainset pengusahanya ( untuk pengarjin yang kecil pokoknya mendapat order) tetapi kalau yang sudah menengah tidak hanya mendapatkan order saja tetapi mereka dapat kreatif dan mengembangkan produknya sendiri. Kalau faktor internalnya yaitu jalan yang terlalu sempit yang bisa menghambat proses untuk menuju lokasi”.

b. Ibu listyaningsih, 6 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“Faktor penghambatnya yaitu terkadang UKM kita kan masih manja dan ada juga yang sudah siap mengikuti. Untuk transport bagi ukm yang sudah besar ditanggung sendiri, ukm yang kecil minta kita fasilitasi baik stand maupun akomodasinya”.

## **PENGUSAHA**

- Apa saja program diskoperindag dalam pemberdayaan industri kecil dalam mengatasi lumpur lapindo? Dan program apa yang sudah dilaksanakan ?

a. Bapak M. Choiri, 8 Agustus 2012 ( Pukul 15.30 WIB )

“Ada 2 program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan Diskoperindag yang sudah diterapkan (pada pengusaha industri tas Tanggulangin) yakni promosi melalui pameran-pameran baik di tanggulangin sendiri maupun di luar Tanggulangin. Kemarin juga ada workshop tentang desain produk untuk memberikan pembinaan model-model tren tas terbaru”.

b. Ibu Hj. Leli, 9 Agustus 2012 ( Pukul 10.00 WIB )

“Kemarin kami yang mempunyai showroom maju makmur diajak Diskoperindag mengikuti kegiatan pameran ke Surabaya dengan membawa produk unggulan kami berupa Tas dan Koper. Dalam pameran tersebut produk yang kami bawa laku keras. Hal ini sering dilakukan oleh Diskoperindag, tetapi hanya beberapa pengusaha saja yang mengikuti kegiatan ini”.

c. Bapak Roni, 9 Agustus 2012 ( Pukul 18.30 WIB )

“Yang sudah diikuti oleh para pengusaha industri kecil tas dan koper Tanggulangin yakni pembinaan dalam mempromosikan produk dan

Desain produk untuk memberi contoh model terkini. Tetapi yang paling gencar dilakukan adalah kegiatan pameran yang diadakan di berbagai daerah. Kapan hari saya mengikuti pameran di Batam, di sana produk kami laku keras”.

- Berapa kali frekuensi pelatihan yang diberikan terhadap industri kecil tanggulangin ?

a. Bapak M. Choiri, 8 Agustus 2012 ( Pukul 15.30 WIB )

“Untuk kegiatan pelatihan hanya beberapa kali saja, khususnya untuk desain produk maupun bantuan merk. Tetapi untuk kegiatan promosi diskoperindag sering mengajak kami membawa produk unggulan yaitu tas dan koper ke berbagai acara pameran maupun kontak dagang”.

a. Ibu Hj. Leli, Leli, 9 Agustus 2012 ( Pukul 10.00 WIB )

“Untuk kegiatan pembinaan jarang dilakukan, karena kami sendiri untuk masalah produksi sudah memenuhi kualitas yang baik. Bulan lalu ada pembinaan desain produk yang dilakukan Diskoperindag untuk memberikan contoh desain-desain terbaru. Tetapi kami khususnya pemilik showroom maju makmur sudah kreatif dalam membuat model-model tas maupun koper”.

b. Bapak Roni, 9 Agustus 2012 ( Pukul 18.30 WIB )

“Kegiatan promosi gencar dilakukan oleh Diskoperindag. Hampir setiap bulan ada pameran. Produk kulit khususnya tas dan koper selalu habis kalau dibawa ke pameran di berbagai daerah. Sebab produk kami secara kualitasnya bagus.

- Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan industri kecil Tanggulangin yang dilakukan Diskoperindag ?

a. Bapak M. Choiri, 8 Agustus 2012 ( Pukul 15.30 WIB )

“Pelaksanaannya untuk kegiatan desain produk pihak diskoperindag langsung memberikan pembinaan ke Kedensari melaluhu INTAKO dan diberikan pengarahan tentang desain terbaru. Kegiatan ini sangat membantu bagi para pengusaha industri kecil tas dan koper disini”.

b. Ibu Hj. Leli, 9 Agustus 2012 ( Pukul 10.00 WIB )

“Untuk kegiatan pembinaan kepada para pengusaha industri tas dan koper, pihak Diskoperindag mengundang beberapa perwakilan saja dari para pengusaha. Tidak semua mengikuti kegiatan tersebut”.

c. Bapak Roni, 9 Agustus 2012 ( Pukul 18.30 WIB )

“Melalui kegiatan promosi, dan pembinaan langsung kepada para pengusaha. Promosi pemasaran dengan mengikuti pameran diberbagai daerah. Event PRJ kami setiap tahun selalu mengikuti”.

- Bagaimana hasil dari program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan Diskoperindag ?

a. Bapak M. Choiri, 8 Agustus 2012 ( Pukul 15.30 WIB )

“Dari program pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag produk yang kami jual memperoleh respon positif dari konsumen sebab modelnya bagus, disamping itu juga kualitasnya baik. Dari berbagai daerah pun juga banyak yang memesan produk dari kami.

b. Ibu Hj. Leli, 9 Agustus 2012 ( Pukul 10.00 WIB )

“Hasilnya memberikan dampak positif bagi kami khususnya pengusaha industri kecil tas dan koper. Karena dengan kegiatan tersebut pendapatan kami meningkat dibanding dengan tahun lalu yang sempat mengalami penurunan karena dampak lumpur lapindo.

c. Bapak Roni, 9 Agustus 2012 ( Pukul 18.30 WIB )

“Dari pembinaan desain produk kami mendapat banyak model-model terbaru yang dapat untuk langsung diproduksi. Banyak dari konsumen yang melakukan pemesanan. Dan kegiatan ini sangat menunjang untuk mempertahankan usaha kami.

- Dalam sektor ekonomi apakah terjadi peningkatan setelah dilakukan pembinaan ?

a. Bapak M. Choiri, 8 Agustus 2012 ( Pukul 15.30 WIB )

“Secara langsung ada peningkatan dari adanya kegiatan promosi melalui pameran-pameran di berbagai daerah yang dilakukan Diskoperindag. Peningkatan pendapatan kami 2 kali lebih banyak dari hasil penjualan di showroom. Yang biasanya 2 juta/hari bisa mencapai 4 juta/hari

b. Ibu Hj. Leli, 9 Agustus 2012 ( Pukul 10.00 WIB )

“Peningkatan sangat signifikan, dahulu setelah terjadi bencana lumpur kami hanya mendapat keuntungan 20 juta/Bulan dan setelah dilakukan pembinaan melalui pameran oleh Diskoperindang sekarang pendapatan kami mencapai 50 juta/Bulan”.

c. Bapak Roni, 9 Agustus 2012 ( Pukul 18.30 WIB )

“Terjadi peningkatan sekitar 20 % lebih. Apalagi kalau musim liburan dan adanya berbagai pameran yang diselenggarakan Diskoperindag dengan tujuan mempromosikan produk kami”.

- Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tanggulangin baik secara internal maupun eksternal ?

a. Bapak M. Choiri, 8 Agustus 2012 ( Pukul 15.30 WIB )

“Faktor Internalnya yakni banyak pekerja kami yang keluar dan beralih kepekerjaan lain. Disamping itu juga akses jalan menuju Showroom kami terlalu sempit”.

b. Ibu Hj. Leli, 9 Agustus 2012 ( Pukul 10.00 WIB )

“Faktor pendukungnya yakni disediakannya stand untuk pameran di berbagai daerah. Untuk internalnya, jalan menuju showroom kami yg kecil dan lahan parkir yang terlalu sempit”.

c. Bapak Roni, 9 Agustus 2012 ( Pukul 18.30 WIB )

“Faktor pendukungnya yakni adanya bantuan berupa mesin jahit. Faktor penghambatnya mahalnya bahan baku.

#### Konsumen

- Bagaimana alasan konsumen masih tetap menggunakan produk industri kecil di Tanggulangin ?

f. Ibu Ani, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB)

“Produk kerajinan tas Tanggulangin kualitasnya bagus”.

g. Ibu Grace, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.05 WIB)

“Harganya terjangkau serta modelnya menarik/ update”.

h. Ibu Lusi, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.15 WIB )

“Akses untuk menuju showroom dekat dengan rumah dan harga terjangkau”.

i. Bapak Fatkhur, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.30 WIB )

“Kualitas kulitnya bagus dan jahitannya sangat rapi”.

j. Bapak Kuswan, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.35 WIB )

“Harganya tidak begitu mahal, tetapi kualitasnya bagus”.

- Bagaimana ekspektasi konsumen terhadap produk industri kecil di Tanggulangin ?

f. Ibu Ani, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.00 WIB )

“Akses jalan menuju showroom sebaiknya diperlebar”.

g. Ibu Grace, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.05 WIB )

“Dipertahankan dan makin dikembangkan lagi produknya.”

h. Ibu Lusi, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.15 WIB )

“Sering-sering diadakan diskon untuk produk tas dan koper di moment tertentu”.

i. Bapak Fatkhur, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.30 WIB )

“Sebaiknya desediakan lahan parkir yang luas”.

j. Bapak Kuswan, 11 Agustus 2012 ( Pukul 11.35 WIB )

“Kualitasnya harus dipertahankan”.





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN,**  
**PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 9 Telepon 8921220  
SIDOARJO - 6 1 2 1 8

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 800/3894 /404.3.7/2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : Drs. MAKSUM, M.Si  
**N I P** : 19561120 198503 1 011  
**Pangkat/Gol.Ruang** : Pembina Utama Muda (IV/c)  
**Jabatan** : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi  
dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : JIMMY DWI FITRIANTO  
**N I M** : 0810313107  
**Program Study** : Ilmu Administrasi  
**Universitas** : Brawijaya Malang

Telah melakukan penelitian untuk keperluan Skripsi dengan judul **"Implementasi Rencana Strategi Diskoperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Tanggulangin Dalam Mengatasi Lumpur Lapindo"** pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo selama 2 (dua) minggu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 9 Nopember 2012

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,**  
**PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN**  
**ENERGI KABUPATEN SIDOARJO**



**Drs. MAKSUM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
19561120 198503 1 011

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Jimmy Dwi Fitrianto  
Umur : 22 tahun  
Tempat/ Tanggal lahir : Sidoarjo/ 3 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. AMD Manunggal 3 Gelang RT 4 RW  
2 Tulangan Sidoarjo  
Nomor Telepon : 085730201001  
Email : [Jimmy\\_ans@yahoo.co.id](mailto:Jimmy_ans@yahoo.co.id)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri I Gelang, Tulangan Sidoarjo lulus Tahun 2002
2. SMP Negeri I Tulangan, Sidoarjo lulus Tahun 2005
3. SMA Antartika Sidoarjo, lulus Tahun 2008
4. S1 Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, Malang masuk Tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buta dengan sebenar-benarnya.

Horat saya,

Jimmy Dwi Fitrianto